



**PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK
OLEH DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

Ahmad Syaiful Ashar

3401407098

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia
Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Setiajid, M.Si
NIP: 19600623 198901 1 001

Martien Herna S., S.Sos.M.Si.
NIP: 19730331 200501 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan HKn,

PERPUSTAKAAN
Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.
NIP: 19610127 198601 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama

Drs. Eko Handoyo, M.Si.
NIP: 19640608 198803 1 001

Penguji I

Penguji II

Drs. Setiajid, M.Si
NIP: 19600623 198901 1 001

Martien Herna S., S.Sos.M.Si.
NIP: 19730331 200501 2 001

PERPUSTAKAAN
UNNES

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,

Drs. Subagyo, M.Pd.
NIP: 19510808 198003 1 003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, September 2011

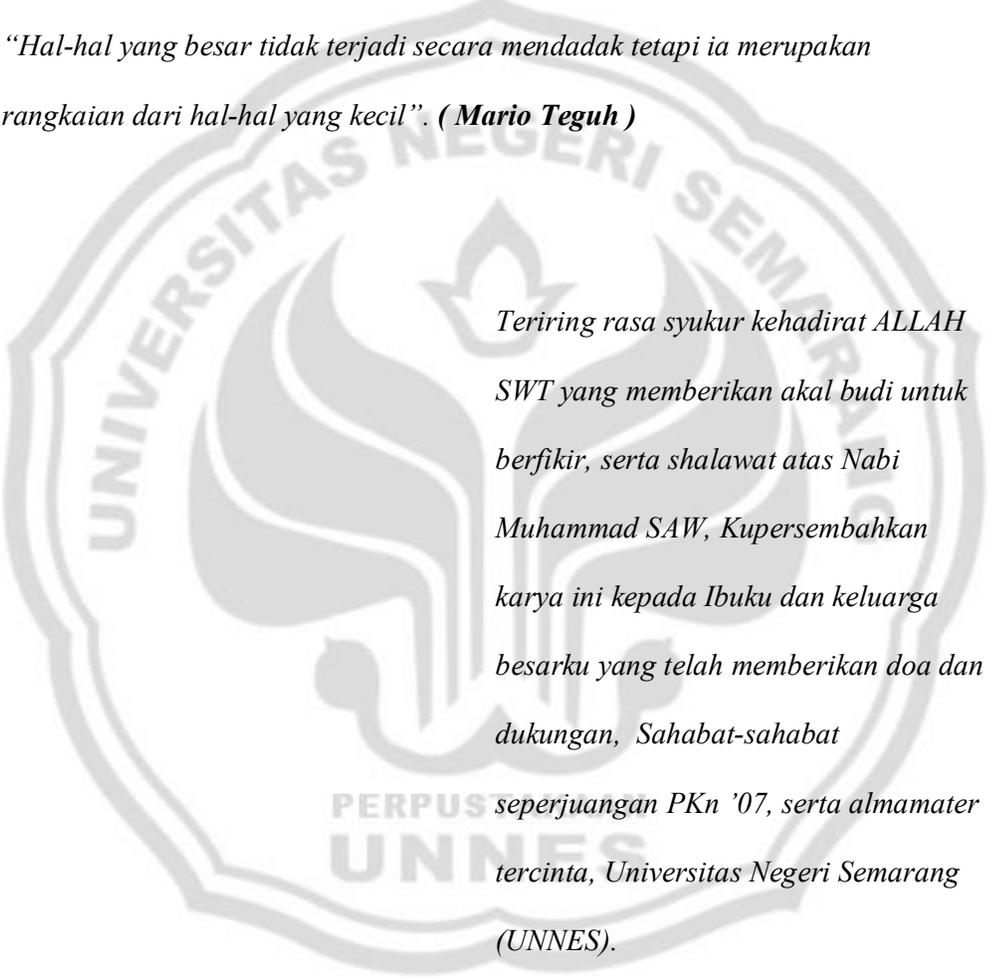
Ahmad Syaiful Ashar
NIM 3401407098



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Politik adalah seni mencari masalah, menemukan masalah di mana-mana, mendiagnosisnya secara serampangan dan memberikan obat yang salah”.
(Groucho Mark).

“Hal-hal yang besar tidak terjadi secara mendadak tetapi ia merupakan rangkaian dari hal-hal yang kecil”. **(Mario Teguh)**



*Teriring rasa syukur kehadiran ALLAH
SWT yang memberikan akal budi untuk
berfikir, serta shalawat atas Nabi
Muhammad SAW, Kupersembahkan
karya ini kepada Ibuku dan keluarga
besarku yang telah memberikan doa dan
dukungan, Sahabat-sahabat
seperjuangan PKn '07, serta almamater
tercinta, Universitas Negeri Semarang
(UNNES).*

SARI

Ashar, Ahmad Syaiful. 2011. *Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.* Skripsi, Jurusan Hukum Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Setiajid, M.Si. Pembimbing II Martien Herna S., S.Sos.,M.Si. 108 hlm.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Partai Keadilan Sejahtera(PKS),

Pendidikan politik bagi partai politik merupakan sarana bagi penguatan dan peningkatan kualitas kader partai politik. Di tengah pertumbuhan partai politik di Indonesia, dalam perkembangannya ada kecenderungan menurunnya kualitas para kader partai baik yang duduk di pemerintahan maupun legislatif yang menunjukkan perilaku tidak baik seperti korupsi, melanggar norma kesusilaan, dan melakukan tindak pidana. Sehingga perlu adanya penguatan dan peningkatan kualitas kader melalui pendidikan politik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) bagaimana pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang, 2) kendala-kendala dalam pendidikan politik, 3) upaya mengatasi kendala pendidikan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang beserta kendala-kendala yang dialami dan upaya mengatasinya.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak secara khusus diatur dalam program kerja partai tersendiri, akan tetapi pendidikan politik tertuang dalam program kerja di bidang kaderisasi, keummatan dan kebijakan publik. Pelaksanaan pendidikan politik PKS Kabupaten Semarang dilaksanakan menggunakan berbagai metode dan strategi antara lain kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar, kajian-kajian, sosialisasi dan kegiatan sosial. Pendidikan politik PKS Kabupaten Semarang pada pelaksanaannya tidak hanya selalu bermuatan politik saja akan tetapi juga terdapat muatan-muatan materi keislaman hal tersebut tidak terlepas dari PKS sebagai partai dakwah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang dilakukan dalam upaya penguatan dan peningkatan kualitas kader. Saran dalam penelitian adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) perlu adanya pelatihan khusus kader untuk dapat mempublikasikan setiap kegiatan kepartaian, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat hadir di tingkat paling bawah di tingkat dusun bahkan RT/RW sebagai upaya meningkatkan kepercayaan dan komunikasi dengan masyarakat.

PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, penguasa segala yang ada di bumi dan langit yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang”** dengan baik. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I di Universitas Negeri Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Subagyo, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd. Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
4. Drs. Setiajid, M.Si. Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Martien Herna S.,S.Sos.M.Si. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah membekali ilmu dan motivasi penyusun untuk terus belajar.

7. Joko Widodo beserta para pengurus DPD PKS Kabupaten Semarang, yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Orang tuaku yang selalu memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluargaku besarku yang selalu memberikan saran, kritik dan motivasi dalam menjalani perkuliahan.
10. Aran, Didik, Adid, Jamaluddin, Wuwuh, Firman, Haryono. Yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2007 FIS UNNES yang selalu memberikan bantuan dan motivasi selama masa perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tiada karya anak manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, begitu juga dalam penulisan skripsi ini memerlukan kritik dan saran yang membangun sebagai masukan bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, September 2011

Penulis

Ahmad Syaiful Ashar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penegasan Istilah	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Partai Politik	12
B. Pendidikan Politik	18

C. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	33
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Fokus Penelitian.....	40
D. Sumber Data Penelitian.....	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Keabsahan Data.....	45
G. Analisis Data	47
H. Prosedur Penelitian	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan	52
1. Gambaran Umum	52
2. Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang.....	73
4. Kendala-kendala Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang serta Upaya Mengatasi	93
B. Pembahasan	96

BAB V PENUTUP

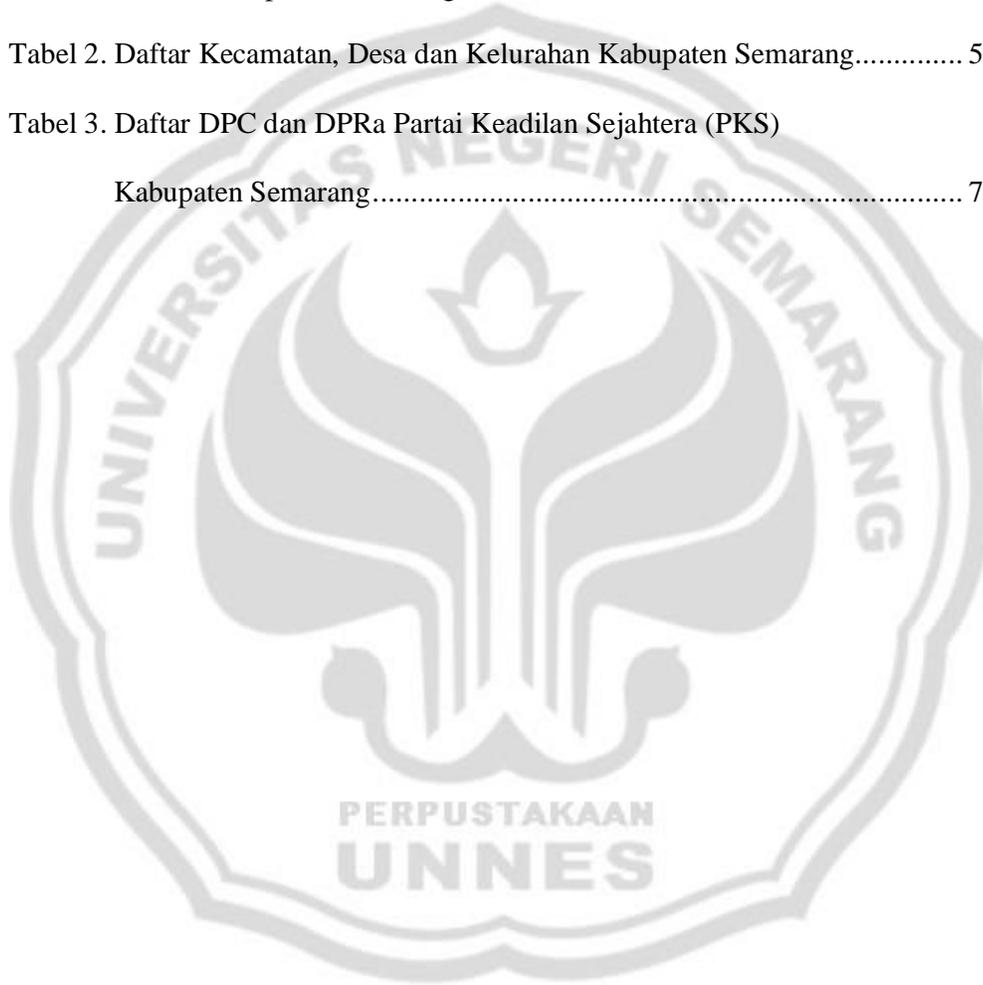
A. Simpulan	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA	107
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perolehan Kursi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu DPRD Kabupaten Semarang Tahun 1999, 2004 dan 2009	5
Tabel 2. Daftar Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Semarang.....	53
Tabel 3. Daftar DPC dan DPRa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang.....	71



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Logo PKS.....	56
-------------------------	----



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Triangulasi pada Pengujian Validitas Data	47
Bagan 1. Tahap Analisis Data	49



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat permohonan ijin penelitian.
2. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian.
3. Susunan Pengurus DPD PKS Kabupaten Semarang
4. Instrumen penelitian
5. Hasil wawancara.
6. Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) PKS.
7. Program kerja bidang kaderisasi.
8. Program kerja bidang keummatan.
9. Program kerja bidang kebijakan publik.
10. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang mengenai: a) perolehan suara partai politik se Kabupaten Semarang dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Semarang tahun 2004, b) perolehan suara partai politik se Kabupaten Semarang dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Semarang tahun 2009, dan c) perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Pemilu anggota DPRD Kabupaten Semarang tahun 2009.
11. Foto dokumentasi penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah terjadi Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 kehidupan bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan, salah satunya di bidang politik dimana selama 32 tahun di bawah kungkungan pemerintahan orde baru yang otoriter. Perubahan itu ditandai dengan diadakannya amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2002. Adanya amandemen itu berimbas terhadap kebebasan berpolitik, antara lain dengan lahirnya partai-partai politik baru baik yang berideologikan agama maupun nasionalis.

Lahirnya partai-partai politik baru tidak terlepas dari pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999, dimana merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan setelah reformasi. Peserta pemilu pada tahun 1999 jauh berbeda dengan pemilu pada masa orde baru, dimana pada masa orde baru hanya diikuti oleh dua partai politik (PDI dan PPP) serta satu golongan karya (Golkar) dan pada pelaksanaan pemilu 1999 diikuti oleh 26 partai politik, baik partai politik lama maupun baru.

Sebagai negara demokratis, kehadiran partai politik adalah suatu keniscayaan, dimana kehadirannya diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat, penyeimbang kekuatan politik serta sebagai sarana pengkritik dan kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa. Namun,

dengan banyaknya partai politik tidak jarang terjadi benturan-benturan kepentingan politik antar partai. Sehingga kecenderungan partai politik lebih fokus mengurus kepentingan partainya saja dan melupakan fungsi pokoknya sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Sikap dan perilaku partai politik yang dianggap sudah menyeleweng, diperparah oleh sikap dan perilaku banyak anggotanya, dimana anggota partai politik yang duduk dalam pemerintah dan DPR bukan berfungsi sebagai wakil rakyat melainkan hanya sebagai wakil partai politik. Para kaum elit politik yang hanya mengejar kepentingannya dengan membentuk partai politik tanpa menghiraukan apakah partai politik itu memperjuangkan platform tertentu, hal tersebut mengakibatkan jumlah partai politik yang tidak terkendali tanpa ada identitas politik tertentu bagi masing-masing partai politik. Keadaan demikian menimbulkan kehidupan politik yang jauh dari mendukung terwujudnya kesejahteraan bangsa. Sikap serta perilaku ini menimbulkan kekecewaan bagi rakyat, sehingga terjadi krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan dan kepemimpinan setiap saat dapat melahirkan ketidakpercayaan politik (*political distrust*), sehingga dimungkinkan terjadi delegitimasi kekuasaan oleh rakyat.

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik bagi warga negara. Pendidikan politik diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga

negara. Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang persoalan politik tetapi juga bagi para pemilih yang sudah memiliki pengetahuan tentang persoalan politik. Hal demikian dikarenakan sikap apatis terhadap kegiatan politik dimungkinkan muncul dari kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan politik, dikarenakan adanya kekecewaan serta frustrasi terhadap sistem politik yang ada. Kondisi seperti ini memunculkan kalangan masyarakat yang apatis dan bahkan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dengan menjadi golput (golongan putih).

Hal ini menjadikan pentingnya pendidikan politik (*political education*) bagi rakyat. Dengan kata lain pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong warga negara (pemilih) untuk memiliki pengetahuan politik yang memadai. Edgar fore dkk (1978) dalam (Prihatmoko, 2003: 74) mendefinisikan pendidikan politik sebagai penyiapan generasi untuk berfikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya, dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik dan mendidik karakter manusia non formal oleh partai politik, media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting, karena dalam melangsungkan pembangunan sebuah bangsa memerlukan syarat untuk keterdidikan rakyat secara politik. Rakyat yang terdidik secara politik adalah warga negara, sehingga ia bisa secara sadar mandiri ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses

pembangunan. Kehadiran partai politik dapat dilihat pada perannya dalam melakukan pendidikan politik kepada warga masyarakat. Dengan pendidikan politik masyarakat dimungkinkan untuk memiliki kebudayaan politik yang ideal, yakni kesadaran untuk mendukung sistem politik dan sekaligus mampu memberikan kritik dan koreksi.

Beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi peneliti memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai obyek penelitian antara lain; *Pertama*, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2004 memperoleh kenaikan perolehan suara yang sangat signifikan, yaitu dari hanya 1,3 persen pada pemilu 1999 menjadi 7,3 persen pada pemilu 2004. Kenaikan perolehan suara ini tidak lepas dari kemampuan PKS untuk membangun partai dan kader yang cukup solid. Di samping itu, (Marijan, 2010: 316) di tengah-tengah mulai memudarnya tingkat kepercayaan pemilih kepada partai-partai, PKS mampu membuat citra bahwa dirinya memiliki perbedaan dengan partai-partai yang lain. Itulah sebabnya, kaum muda muslim konservatif lebih cenderung memilih PKS dibandingkan dengan partai-partai Islam lainnya.

Kedua, partai ini memenangkan pemilu 2009 di daerah pemilihan antara lain, di DKI Jakarta yang dapat dikatakan sebagai salah satu barometer demokrasi di Indonesia. Karakteristik pemilih di DKI Jakarta adalah pemilih yang mayoritas pemilihnya kaum terpelajar serta bertempat tinggal di daerah perkotaan. Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Semarang, dimana Kabupaten Semarang yang merupakan salah satu

daerah yang terintegrasi dengan Kota Semarang memiliki kesamaan karakteristik pemilih yaitu mayoritas pemilihnya kaum terpelajar serta bertempat tinggal di daerah perkotaan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan salah satu partai baru dapat bersaing dengan partai besar lainnya yang sudah cukup mempunyai basis massa yang kuat. Pemilu legislatif Kabupaten Semarang 2009-2014, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil memperoleh 4 kursi, hal tersebut merupakan prestasi bagi suatu partai politik baru dan perlu adanya upaya terus menerus untuk menjaga eksistensinya dan sekaligus meningkatkan basis massa pendukungnya. Di bawah ini disajikan tabel perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang.

Tabel 1 Perolehan Kursi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu DPRD Kabupaten Semarang Tahun 1999, 2004 dan 2009

Periode Pemilu	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V	Jumlah	Jumlah Kursi di DPRD
Tahun 1999	-	-	-	-	-	4.034	1
Tahun 2004	4.749	4.745	4.240	7.143	9.493	30.370	5
Tahun 2009	7.806	5.425	4.647	6.802	12.479	37.159	4

Sumber: KPUD Kabupaten Semarang

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang telah mengikuti 3 pemilu yaitu tahun 1999, 2004

dan 2009. Sebelumnya pada pemilu tahun 1999 partai ini masih menggunakan nama Partai Keadilan (PK), dengan memperoleh 4.034 suara dan hanya memperoleh 1 kursi di DPRD Kabupaten Semarang. Pemilu tahun 2004 dan 2009 sistem pemilu berubah dengan menggunakan sistem daerah pemilihan (Dapil). Di Kabupaten Semarang sendiri dibagi menjadi lima dapil, yaitu Dapil I terdiri dari Ungaran barat, Ungaran timur dan Bergas; Dapil II terdiri dari Tuntang, Bawen dan Pringapus; Dapil III terdiri dari Banyubiru, Jambu, Sumowono dan Bandungan; Dapil IV terdiri dari Suruh, Pabelan, Bringin dan Bancak; dan Dapil V terdiri dari Getasan, Tengar, Susukan dan Kaliwungu. Pemilu tahun 2004 Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 30.370 suara sehingga memperoleh 5 kursi di DPRD Kabupaten Semarang, kemudian pada pemilu 2009 Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 37.159 suara sehingga memperoleh 4 kursi di DPRD Kabupaten Semarang.

Data di atas menunjukkan peningkatan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang dari pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009, peningkatan perolehan suara tersebut bukan datang secara serentak, namun melalui proses dan kerja keras para pengurus dan kader partai dalam upaya meningkatkan perolehan suaranya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera yaitu dengan melakukan pendidikan politik bagi para kader serta pemilih di Kabupaten Semarang. Pendidikan politik dilakukan dengan menggunakan dua media yaitu media langsung dan media tidak langsung, media langsung antara lain berbentuk

diskusi, pelatihan, seminar, *workshop* serta kegiatan sosial yang semuanya diarahkan pada materi pendidikan politik. Media tidak langsung berbentuk pemasangan spanduk, selebaran, pamphlet serta iklan di media massa yang isinya himbauan kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam politik. Pendidikan politik tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang pada muaranya akan berimbas pada peningkatan jumlah suara partai pada pemilu.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang memiliki ciri khusus yaitu terletak pada pendidikan politik yang diberikan tidak saja berorientasi pada muatan politik saja, namun juga mengenai materi keagamaan ciri tersebut menunjukkan bahwa PKS sebagai partai dakwah dan ciri lain terletak pada kegiatan sosial yang dilakukan. Kegiatan sosial tersebut antara lain melalui kegiatan sarasehan dengan tokoh-tokoh masyarakat baik melalui lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan maupun pendekatan secara pribadi, kegiatan sosial tersebut merupakan salah satu terobosan untuk melakukan pendidikan politik secara tidak langsung bagi kader dan pemilih, sehingga dengan pendidikan politik tersebut Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang menjadi salah satu partai yang diperhitungkan dan mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Partai ini disamping secara kuantitatif mengalami perluasan dukungan dari masyarakat dan dari sisi kualitatif PKS juga memberikan bacaan baru tentang perilaku budaya politik yang santun ketika

berkampanye, berani, peduli dengan nasib orang-orang yang terpinggirkan, juga memiliki sikap kritis terhadap politik luar negeri pemerintah yang dapat merugikan kedaulatan bangsa Indonesia (Nasiwan, 2005). Karakteristik tersebut menarik untuk dicermati apakah merupakan hasil dari suatu pendidikan politik.

Sehubungan dengan peran partai politik yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menjalankan fungsi dan peranannya melakukan pendidikan politik bagi kader dan pemilih, kiranya sangat menarik untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana sebuah partai politik melakukan proses pendidikan politik baik pada anggota maupun warga masyarakat. Sehingga dari latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menuangkan dalam sebuah skripsi dengan mengambil judul "Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang?
- b. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang?

- c. Upaya mengatasi kendala dalam pendidikan politik oleh DPD PKS Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang.
- b. Mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik di DPD PKS Kabupaten Semarang.
- c. Mengetahui Upaya mengatasi kendala dalam pendidikan politik oleh DPD PKS Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan bagi pihak yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan pendidikan politik..

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Partai Politik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kemampuan partai

melakukan pendidikan politik bagi pengurus, kader, simpatisan maupun masyarakat umum.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat akan memiliki pengetahuan mengenai sistem politik yang ada, sehingga dengan pengetahuan politik tersebut masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang pada muaranya masyarakat akan lebih aktif dalam kegiatan politik seperti mengikuti pemilu, dan masuk partai politik.

c. Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang.

E. Penegasan Istilah

Agar lebih jelas dan mudah dimengerti dari judul penelitian ini, maka peneliti menggunakan penegasan dalam memberikan pengertian dari judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Pendidikan Politik

Pelaksanaan pendidikan politik merupakan proses menanamkan nilai-nilai, orientasi-orientasi serta pengetahuan politik oleh partai politik sebagai upaya pengenalan visi misi dan program partai serta peningkatan kualitas kader.

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang berasaskan Islam. Pada awalnya partai ini bernama Partai Keadilan kemudian pada tanggal 20 April 2002 didirikanlah partai baru yang akan menjadi wadah bagi kelanjutan kiprah politik dakwah warga Partai Keadilan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau disingkat PKS. Lambang dari Partai Keadilan Sejahtera adalah kotak persegi empat dengan menampilkan dua bulan sabit dan untaian 17 butir padi berwarna kuning emas.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Budiarjo, 2005: 60).

Untuk menambah serta mempertegas pengertian di atas, di bawah ini disampaikan beberapa definisi mengenai partai politik:

- a. Carl J. Fredrich mengartikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisasi dengan stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil (Budiarjo, 2005: 61).
- b. R.H. Soltou mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka (Budiarjo, 2005: 161).
- c. Sigmund Neumann dalam karangannya *modern political parties* mengemukakan definisi sebagai berikut: partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (Budiarjo, 2005: 162).

Dari definisi di atas, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasikan dengan tujuan tertentu dan berusaha mencapai tujuan itu dengan mengambil bagian dalam perebutan kekuasaan melalui pemilihan umum. Partai politik merupakan salah satu komponen infra struktur politik, dimana partai politik menjadi perantara yang menghubungkan aspirasi-aspirasi yang beredar di masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan.

2. Peranan dan fungsi partai politik

Menurut UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 11 ayat 1, partai politik memiliki fungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui, mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi (Budiarjo, 2005: 163):

a. Partai sebagai Komunikasi Politik

Salah satu tugas partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Partai politik berfungsi sebagai komunikasi politik, artinya keberadaan partai politik di dalam kehidupan perpolitikan nasional berada pada posisi ditengah-tengah, panyalur aspirasi dari arus bawah (rakyat) dan penyalur informasi dari arus atas (penguasa). Titik pertemuan antara aspirasi dan informasi ini diolah oleh partai politik yang melahirkan program perjuangan politik. Perjuangan ke atas mengisyaratkan agar program kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, penegakan hukum, dan nilai-nilai diutamakan, perjuangan ke bawah mengisyaratkan agar rakyat mengerti dan memahami apa yang sesungguhnya sedang dikerjakan oleh penguasa untuk melaksanakan kebijakan kesejahteraan rakyat dan menjaga keamanan, perbaikan ekonomi, dan pertahanan negara.

b. Partai sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik juga memainkan peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat

berada. Disamping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi kegenerasi berikutnya.

Sosialisasi politik adalah proses untuk memperkenalkan nilai-nilai politik yang hidup pada tiap diri seseorang sebagai bagian dari sistem nilai budaya masyarakat. Sosialisasi politik dapat pula berfungsi membentuk dan mengubah nilai-nilai politik seseorang sehingga orang yang bersangkutan berperilaku politik. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, kursus penataran dan sebagainya.

c. Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain, juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*).

d. Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*)

Dalam negara demokrasi yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering menimbulkan konflik sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, konflik harus bisa dikendalikan atau dijinakkan agar tidak berlarut-larut yang bisa menggoyahkan dan membahayakan eksistensi bangsa. Dalam hal ini, partai politik dapat berperan menekan konflik seminimal mungkin.

3. Klasifikasi Partai Politik

Ramlan Surbakti (1999) dalam (Suryadi, 2006: 62), mengklasifikasikan partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti azas dan orientasi, basis sosial dan tujuan. Sebagai berikut:

a. Berdasarkan azas dan orientasi

Berdasarkan azas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan menjadi tipe-tipe. Adapun ketiga tipe ini meliputi partai politik pragmatis, partai politik doktriner dan partai politik kepentingan.

Partai politik pragmatis ialah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terkait kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan dan penampilan partai politik tersebut.

Partai doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran

ideologi. Ideologi yang dimaksud ialah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara konkret dan sistematis dalam bentuk-bentuk program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai.

Partai kepentingan merupakan suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

b. Berdasarkan komposisi dan fungsi anggota

Klasifikasi ini partai politik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu partai massa atau lindungan (*patronage party*) dan partai kader. Partai massa atau lindungan ialah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat.

Partai kader ialah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi anggota dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur organisasi partai ini sangat hirarkhis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas.

c. Berdasarkan basis sosial dan tujuan

Berdasarkan basis sosial dan tujuan ini dapat dibagi menjadi empat tipe:

- 1) Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah;
- 2) Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh dan pengusaha;
- 3) Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Khatolik, Protestan dan Hindu, dan
- 4) Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa dan daerah tertentu.

B. Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik sering disebut dengan istilah *political forming* atau *politische bildung*. Disebut *öformingö* karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut *öbildungö* (pembentukan atau, pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut mengandung pengertian pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik (Kartono, 1989: 13).

Giesecke (ahli didaktik, pendidik dan politikus Jerman), mendefinisikan pendidikan politik sebagai (a) *Bildungswissen* yang artinya yaitu bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (*mensbeeld*) serta perkembangannya, dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri sehingga; orang sadar akan kekuatan pribadi dan kemampuan bangsa sendiri, sadar akan identitas sendiri, memiliki kepercayaan sendiri yang kuat dan sanggup menghapus kompleks rasa rendah diri serta rasa dependensi pada kekuatan atau bangsa lain, dan memahami benar kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup dan filsafat hidup bangsa (dalam hal ini pancasila) yang dipakai sebagai patokan perjuangan untuk mencapai sasaran hidup berbangsa, yaitu hidup sejahtera; (b) *Orientierungswissen* yaitu mampu berorientasi pada paham-paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan pada setiap warga negara dan umat manusia. Secara obyektif orang harus berani melihat realitas nyata, dan mau mengadakan orientasi ulang terhadap situasi kondisi politik yang belum mantap, khususnya mengoreksi kelemahan noda dan unsur destruktif lainnya. Sehingga bisa ditemukan alternatif penyelesaian yang baik, dan orang bisa keluar dari macam-macam jalan buntu/impasse, menuju keseimbangan dan keserasian hidup bersama; (c) *Verhaltungswissen* yaitu menunjuk pada perilaku yaitu memahami hukum, norma, tata tertib, dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik. Sehingga subyek menjadi lebih cermat dan

lebih bijaksana menanggapi situasi politik sesaat. Caranya ialah dengan jalan mampu mengendalikan tingkah laku sendiri atas pertimbangan hati nurani yang murni sehingga orang menjadi tidak salah tingkah dan tidak egoistis-egosentris, dan mau menjunjung tinggi prinsip kesusilaan; (d) *Aktionwissen* artinya mampu bertingkah laku tepat, cermat dan benar, sebab didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan, disertai refleksi objektif, dan wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan harus bersifat universal. Refleksi mengandung kesanggupan mempertimbangkan baik-baik, dan mampu melakukan pencerminan kembali peristiwa-peristiwa politik, hingga terjadi pewawasan reflektif, serta membuahkan ide-ide dan aksi/tindakan yang tepat mantap untuk mengatasi semua kesulitan (Kartono, 1989: 30).

R. Hajer mendefinisikan pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik (Kartono, 1989 : 14). Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terorganisir dan efektif yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa dengan jalan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang dalam perjuangan politik (Kartono, 1989: 14). Lewat pendidikan politik

orang berusaha melakukan pembentukan pribadi yang demokratis (*demokratische persoonsvorming*), disamping usaha demokratisasi dari struktur kemasyarakatannya.

Menurut Alfian dalam (Karim, 1989: 97) mendefinisikan pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.

Melalui pendidikan politik diharapkan pula adanya perubahan sikap; yaitu dari apatisme dan kepasifan, beralih menjadi sikap aktif, penuh inisiatif, maju, dan demokratis. Setiap warga negara seharusnya turut membangun masyarakat dan negaranya, yang dilakukan bersama dengan pemerintah. Juga aktif dalam usaha mendinamisir dan merenovasi lembaga masyarakat, dan sistem politiknya. Hal ini sangat perlu untuk melawan sisa-sisa birokratisasi yang terlalu ketat/overbirokratisasi, teknokarsi otoriter, dan tirani personal dari penguasa. Disamping itu pendidikan politik bisa memberi sumbangan bagi proses demokrasi yang lebih maju dari segenap lapisan masyarakat, dengan menggunakan prinsip-prinsip yang realistik dan manusiawi.

Dari definisi di atas, pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa yang terorganisir dan dilakukan secara sengaja dan sistematis, untuk memberi pengetahuan pada warga negara agar memiliki pengetahuan politik sehingga menjadikan warga negara memiliki kesadaran serta kepribadian politik, yang pada akhirnya diharapkan dapat melakukan kritik serta koreksi pada pemerintah.

2. Pendidikan Politik Dalam Bahasa Edukatif

- a. Pendidikan politik merupakan upaya belajar dan latihan untuk mensistematisasikan aktifitas sosial, dan membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama disuatu wilayah negara. Kebijakan ini antara lain berupa mengembangkan sportivitas, bertingkah laku baik, jujur, solider, dan loyal terhadap bangsa sendiri, bersikap kooperatif dan praktis, bisa bekerja dalam kelompok, toleran. Perilaku penuh kebijakan ini merupakan syarat teknis dalam tingkah laku politik, demi pencapaian kebaikan dan kesejahteraan bersama.
- b. Pendidikan politik itu identik dengan pembentukan hati nurani politik yang didalamnya secara implisit mencakup pertanggung jawaban etis terhadap sesama warga negara.

Dalam iklim demokrasi, rakyat diberi kesempatan untuk memilih sendiri atas tanggung jawab sendiri. Karena itu dia diajar untuk bersikap jujur dan berani, serta sanggup mempertanggungjawabkan kejadian-kejadian yang terjadi di

negaranya, di samping ikut menentukan norma-norma yang sepatutnya dijadikan panutan umum. Jadi dia tidak bersikap naif pasif, serta cuma berani mengkhayalkan ide demokrasi saja. Massa rakyat harus mampu bersikap kreatif, kritis, mandiri, otonom, dan mantap bila kepadanya diberikan kesempatan untuk berperilaku demokratis.

- c. Pendidikan politik menumbuhkan skeptisisme politik dan kearifan wawasan politik mengenai semua jaringan politik.

Skeptisisme harus diartikan sebagai skeptisme ilmiah, untuk menghindari sikap tidak kritis, mudah percaya dan menyakini õkebenaranõ mitos-mitos, politik hingga orang mampu menjalankan kontrol politik, pemngecekan dan verifikasinya.

Fakta politik dengan segenap kaitannya itu bukan merupakan kepastian permanen, menetap, dan massif tidak berubah, akan tetapi berupa gejala õmemproses/menjadiõ yang dinamis, bisa berubah dan diubah dengan sengaja (untuk dibetulkan dan disempurnakan) demi kepentingan bangsa dan negara. Pribadi yang mempunyai dasar pendidikan politik yang kuat akan selalu berkepentingan dengan:

- 1) Ketidakmantapan (dinamisme) dan perubahan dari struktur-struktur serta urusan-urusan lokal, regional dan nasional.
- 2) Cenderung mengusahakan perbaikan dan penyempurnaan.

- d. Pendidikan politik mendorong orang untuk melakukan perbaikan terhadap jaringan kemasyarakatan.

Politik dan negara itu bukan masalah formula teoritis, fiksi yuridis atau urusan abstrak akan tetapi benar-benar merupakan kenyataan telanjang dan keras, penuh unsure kontroversial dan kontradiktif, dan konflik-konflik tajam. Maka yang penting bagi kita ialah bukannya menetapkan formalitas-formalitas resmi dan banyak preskripsi yuridis, akan tetapi ditengah kenyataan hidup sehari-hari ini proses demokrasi, itu apakah sudah diterapkan dengan benar atau belum? Bagaimanakah keadaan senyatanya dan bukan bagaimana sesuatu itu akan berlangsung menurut satu konsep politik tertentu Pendidikan politik membahas konflik-konflik aktual.

Dalam pendidikan politik akan diperoleh kemampuan rakyat untuk menganalisa macam-macam konflik politik, dan berusaha untuk ikut memecahkannya. Dengan demikian orang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk ikut mengatur negara dan pemerintahan, dan mengontrol gerak pembangunan, tanpa terjadi konflik-konflik yang membahayakan (Kartono, 1989: 25).

3. Tujuan Pendidikan Politik

Partai politik bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, sebagaimana juga bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi pada individu agar menjadi partisipasi politik yang positif (Prihatmoko, 2003: 180).

a. Kepribadian Politik

Kepribadian politik adalah sejumlah orientasi yang terbentuk pada individu untuk menghadapi dunia politik. Kepribadian politik merupakan tujuan pokok dari proses pendidikan politik. Karena itu, tidak ada kesadaran politik tanpa kandungan kepribadian politik, dan bahwa tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh jenis kultur politik yang membentuk kandungan kepribadian politik.

Kepribadian politik merupakan respon yang dinamis dan berkesinambungan, biasanya muncul karena adanya rangsangan politik. Karena itu meliputi sejumlah motivasi yang mungkin diuraikan menjadi sekumpulan nilai dan kebutuhan, pengetahuan, dan kecenderungan perilaku. Kepribadian politik terbentuk melalui metode-metode sosialisasi atau pendidikan politik itu sendiri. Bahwa ada tiga faktor penting lainnya yang memberikan kontribusi dalam pengembangan kepribadian politik, sistem politik dilihat dari format dan fungsinya yang memainkan peran penting dalam menentukan orientasi-orientasi politik pada individu.

Berbagai bentuk pengalaman dan hubungan yang dibuat oleh beberapa individu dan kelompok lain. Kemampuan dan kecakapan-kecakapan khusus, kepribadian politik terus berkembang sebagai hasil dari interaksi antara ketiga faktor di atas.

b. Kesadaran Politik

Menurut Petter kesadaran politik adalah berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitan dengan kekuasaan politik.

Menurut Paulo Ferayeri kesadaran politik adalah pengetahuan yang kritis pandangan yang benar terhadap realitas, dan pemahaman yang baik terhadap dunia dimana manusia itu hidup, kemudian berusaha untuk merubahnya. Kesadaran adalah instrumen kritis yang digunakan oleh orang-orang tertindas untuk menyingkap hakekat dan mereka yang menindasnya.

Kesadaran politik dapat dicapai melalui satu atau lebih cara sebagai berikut: arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun nonformal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan dan pengajaran politik langsung, yang dilakukan oleh para pemikir dan pemimpin-pemimpin politik. Pengalaman politik yang didapatkan melalui partisipasi politik. Kesadaran muncul melalui dialog-dialog kritis.

Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran politik antara lain adalah jenis kultur politik dimana individu itu tumbuh darinya,

atau dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya, wawasan politik partisipasi menyebabkan orientasi warga terhadap politik bersifat aktif. Berbagai perubahan budaya yang terjadi di masyarakat, yang dapat melahirkan berbagai nilai, konsepsi, dan wawasan baru, yang mempengaruhi kesadaran politik individu dalam masyarakatnya. Berbagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki individu, juga tingkat pendidikannya, individu yang lebih banyak mengenyam pendidikan akan lebih luas wawasan dan pengetahuan politiknya sehingga membentuk kesadaran politiknya.

c. Partisipasi Politik

Menurut Mayron Weiner partisipasi politik adalah kegiatan sukarela yang bertujuan memberikan pengaruh agar memilih strategi umum, atau memilih pemimpin-pemimpin politik tingkat local maupun nasional.

Kamal Al-Manufi mendefinisikan partisipasi politik adalah hasrat individu untuk berperan aktif dalam kehidupan politik melalui pengelolaan hak suara, atau pencalonan untuk lembaga-lembaga yang dipilih, mendiskusikan persoalan-persoalan politik dengan orang lain atau bergabung dengan organisasi-organisasi mediator.

Partisipasi politik merupakan media fundamental untuk memperdalam rasa tanggung jawab pada diri penguasa maupun

rakyat. Partisipasi politik akan menyadarkan para partisipan akan hak dan kewajiban mereka, serta memperluas koridor kesadaran politik melalui berbagai pengalaman dan wawasan politik yang lahir darinya.

4. Aspek-Aspek yang di Bangun dalam Pendidikan Politik

a. Aspek Kognitif; membangun pengetahuan politik warga negara

Salah satu tujuan pendidikan politik adalah membangun politik warga negara. Pengetahuan dan pemahaman warga negara terhadap konsep-konsep politik dasar tertentu menjadi sangat penting untuk dibangun karena tanpanya kesadaran politik yang kritis tidak mungkin ditumbuhkan padahal, kesadaran politik yang kritis merupakan syarat penting bagi partisipasi politik warga negara (Nur, 1999:51).

Sekurang-kurangnya ada lima persoalan yang dapat diketahui dan dipahami sebagai warga negara dalam kerangka membangun aspek kognitif. Kelima pokok proses kesadaran pengetahuan politik kritis tersebut adalah: *pertama*, demokarsi dan hak-hak warga negara. *Kedua*, kedaulatan rakyat. *Ketiga*, sistem kelembagaan. *Keempat*, hubungan kekuasaan puast dan daerah. *Kelima*, sistem ekonomi (Nur, 1999:52)

Peran partai politik sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik yang bersifat memontatif dalam kampanye mempunyai arti penting dalam pengembangan dan penyadaran

politik bagi warga negara. Kesediaan partai politik dalam hal ini tentulah tidak rela melupakan sumber daya partai, konsep, program dan visi misi partai politik. Segala program dan infrastruktur tentunya mengharap tetap menjadi andalan konstituennya.

b. Aspek Afektif; Membangun Karakter Keberpihakan pada Politik Kebangsaan

Pendidikan adalah proses mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai tertentu pada warga negara. Nilai-nilai itu disampaikan dan ditanamkan untuk membentuk karakter dan keberpihakan warga negara implementasi nilai-nilai itu dalam kehidupannya sehari-hari baik dalam kepastian sebagai individu yang bebas otonom, maupun sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Nilai-nilai yang disampaikan partai politik, oleh para juru kampanye agar memiliki karakter dan keberpihakan yang positif. Maka dalam pendidikan politik nilai-nilai yang ditawarkan atau disampaikan adalah nilai-nilai dasar demokrasi yaitu kebebasan, tanggung jawab, kemandirian mewujudkan diri sendiri, hak untuk menentukan diri sendiri, toleransi, hal ini merupakan nilai-nilai yang menopang bekerjanya masyarakat atau bangsa yang demokratis (Nur, 1999: 84-88).

c. Aspek Psikomotorik; Membangun Kecakapan Sebagai Warga Negara

Unsur dasar dari pendidikan politik warga negara di dalam masyarakat yang demokratis adalah kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipasi. Kecakapan intelektual merupakan kecakapan berpikir kritis, merupakan kecakapan dalam melihat berbagai persoalan politik dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari materi pendidikan politik. Pada saat kampanye maka masyarakat sebagai sarana kampanye akan mempunyai kemampuan untuk memikirkan isu politik secara kritis (Nur, 1999: 100).

Kampanye partai politik sebagai salah satu bentuk pendidikan politik akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjelaskan bagaimana sistem politik bekerja dan dimana posisi dalam sistem. Kampanye partai politik mestinya tidak hanya mengusik kesadaran kritis masyarakat tetapi juga berujung pada tindak keterlibatan masyarakat atau partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas kehidupan sosial dan politik negara ini.

5. Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik

Partai-partai politik khususnya di negara-negara berkembang memainkan peran penting dalam menciptakan dan mengubah kultur politik. Berdirinya partai-partai politik dalam suatu masyarakat

merupakan media pendidikan politik yang sesungguhnya (Muis, 2000: 124).

Partai politik sampai batas tertentu memainkan perannya dalam pendidikan politik melalui: *pertama*, pengajaran politik yang benar. Hal ini dilakukan dengan mengadakan berbagai pertemuan, muktamar, resepsi, program pelatihan politik, pengajaran sejarah nasional, serta publikasi program dan pandangan politik di berbagai jurnal dan buletin. Partai termasuk lembaga pendidikan yang memberikan berbagai informasi politik, ekonomi, dan sosial kepada rakyat dengan sederhana namun membangkitkan kesadaran politik mereka. Disamping itu, partai bekerja untuk memobilisasi rakyat di belakang berbagai pandangan politik. Partai juga merupakan alat untuk menciptakan perubahan orientasi dan perilaku masyarakat.

Kedua, Pemberian kesempatan untuk berpartisipasi politik secara teratur dan dalam bentuk yang lebih berkelanjutan. Huntington menegaskan bahwa sarana institusional yang utama untuk mengatur keluasan partisipasi politik adalah partai politik. Ia dapat memberi bingkai yang lebih penting dan serasi untuk mewujudkan partisipasi politik, partisipasi politik ini akan menyebabkan semakin kokohnya nilai-nilai yang sudah ada atau bisa juga menyebabkan tertanamnya nilai-nilai baru. Munculnya partai-partai juga menumbuhkan keinginan anggota masyarakat untuk melakukan praktek politik dan berpartisipasi

didalamnya, jika mereka memilih harapan optimisme bahwa partisipasi tersebut tergantung kepada kemampuan dan kecakapan mereka.

Ketiga, kehidupan partai politik termasuk media penyiapan dan pelatihan bagi individu untuk berani mengambil keputusan berfikir independen mengenai berbagai masalah umum, serta kemampuan untuk bersikap kritis dan menentukan pilihan, yang merupakan kemampuan-kemampuan dasar bagi sebuah partisipasi yang matang.

Syafiq Gharbal menegaskan bahwa pengembangan kemampuan memutuskan dan memilih pada diri warga negara akan terjadi melalui koordinasi kelompok-kelompok politik maupun nonpolitik, seperti berbagai asosiasi misalnya, dan dengan bergabungnya individu ke dalamnya. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut, individu akan berlatih untuk beraktivitas politik, menguatkan pengaruhnya, meminimalisir dominasi atasnya, dan secara efektif akan membentuk tokoh-tokoh politik (Muis, 2000: 125).

Akan tetapi kemampuan tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan politik dalam masyarakat pada umumnya, dan dalam partai itu sendiri. Pendidikan politik dengan makna seperti yang diinginkan tersebut tidak mungkin tercapai dalam partai jika aktivitas politik di dalamnya telah berubah menjadi ajang saling hasut untuk

membangkitkan emosi dan membakar hubungan pribadi disatu sisi, serta untuk mengkokohkan kekuasaan diktator di sisi lain.

C. Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai yang berasaskan Islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan aktivitas dakwah Islam semenjak awal tahun delapan puluhan. Partai dengan lambang dua bulan sabit ini merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1998.

Partai Keadilan didirikan oleh para aktivis intelektual Islam yang sering disebut komunitas dakwah, yang lahir dari fenomena politik kampus semenjak akhir dasawarsa 1970-an, terutama setelah diberlakukannya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang mempersempit ruang kebebasan dakwah. Pada awal dekade 1980-an mulai muncul gerakan keislaman dengan masjid-masjid sebagai basis operasional dan strukturalnya, terutama masjid kampus. Ketika ada gerakan reformasi yang diikuti oleh lengsernya Soeharto, komunitas dakwah ini tidak menyia-nyiakan waktu untuk mendirikan partai. Berdasarkan latar belakang seperti itulah, Partai Keadilan didirikan dengan menggunakan Islam sebagai asas partai dan dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998. partai yang dikomandani dengan istilah Presiden partai oleh Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail dan Sekretaris Jenderal H. Anis Matta, Lc.

Ini berorientasi pada ajaran Islam guna mencapai tujuan dakwah Islam (Kamarudin, 2003: 73).

Bersama dengan 41 partai politik lainnya, Partai Keadilan memelopori tuntutan perubahan ketentuan Undang-Undang pemilu tentang *electoral threshold* yang dirasakan tidak adil oleh mereka. Namun upaya ini menghadapi jalan buntu karena dihadang oleh sebagian kekuatan partai-partai besar yang khawatir akan revalitas dari kekuatan yang baru tumbuh. Pasca pemilu 1999 dan berusaha agar ketentuan *electoral threshold* itu dibatalkan, Partai Keadilan juga menyiapkan sebuah partai lain untuk mengantisipasi tetap diberlakukannya ketentuan *electoral threshold*, maka pada tanggal 20 April 2002 didirikanlah partai baru yang akan menjadi wadah bagi kelanjutan kiprah politik dakwah warga Partai Keadilan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau disingkat PKS. PKS dipimpin oleh Almuzammil Yusuf. Sementara, sejak tanggal tanggal 21 Mei 2000 Partai Keadilan dipimpin Hidayat Nur Wahid sebagai presiden partai, karena Nur Mahmudi Ismail mengundurkan diri dari pengurusan partai setelah ia terpilih menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam kabinet pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid (Aritasius, 2004: 302).

Setelah resmi berdiri lewat akta notaris, untuk mengukuhkan pendiriannya pada tanggal 18 maret 2003, Partai Kedilan Sejahtera melakukan pendaftaran sementara sebagai partai politik yang berbadan hukum ke Departemen Kehakiman dan HAM. Sejak saat itu, terdapat dua

partai yang berjalan dan melakukan berbagai aktivitas secara bersamaan. Sering kali mereka terlibat dalam sebuah aksi-aksi demonstrasi (Aritasius, 2004: 304).

Dalam Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan yang berlangsung tanggal 17 April 2003 di Wisma Haji Bekasi Jawa Barat, merekomendasikan agar Partai Keadilan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Namun penggabungan itu baru resmi dilakukan pada tanggal 3 Juli 2003. Dengan penggabungan itu, seluruh hak milik Partai Keadilan menjadi milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) termasuk anggota dewan dan para kadernya. Sementara itu, Partai keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah mendaftarkan secara resmi ke Depkehham pada tanggal 27 Mei 2003, akhirnya dapat disahkan sebagai partai politik yang berbadan hukum pada tanggal 17 juli 2003. Setelah itu dilakukan perombakan pengurus, hingga akhirnya tanggal 18 September 2003 pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masa bakti 2003-2008 dikukuhkan. Dalam pengurusan yang baru, Hidayat Nur Wahid yang semula menjabat Pimpinan Partai Keadilan menggantikan posisi Almuzammil yusuf sebagai Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Aritasius, 2004: 304).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai yang berazaskan Islam memiliki visi serta misi dalam upaya menjaga keberlangsungan serta mendukung keberhasilan partai. Visi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dibagi menjadi dua yaitu visi umum dan visi khusus, visi umum yaitu sebagai partai da'wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai

persatuan umat dan bangsa. Visi khusus yaitu partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat indonesia yang madani. Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan kegiatan kepartaian Partai Keadilan sejahtera (PKS) memiliki misi yaitu sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir;
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi;
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat;
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya;
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam;
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi;

7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas (AD/ART Partai Keadilan Sejahtera).

Jenis dan jenjang Keanggotaan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tertuang dalam AD/ART Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pasal 3 terdiri dari:

1. Anggota kader pendukung, yang terdiri dari:
 - a. Anggota Pemula yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai.
 - b. Anggota Muda yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu.
2. Anggota Kader Inti, yang terdiri dari:
 - a. Anggota Madya yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar dua.
 - b. Anggota Dewasa yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut.

- c. Anggota Ahli yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
 - d. Anggota Purna yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli.
3. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Jenjang keanggotaan partai teradministrasi dan dikelola oleh badan khusus pembinaan kader yang disebut BPK (Badan Pembinaan Kader), yang di dalamnya terdapat departemen-departemen yang membidangi segala urusan kader. Kader juga dibina melalui perangkat-perangkat yang disebut perangkat tarbiyah, perangkat inilah yang merupakan sarana kader untuk bisa dikader dan dilatih sesuai dengan jenjangnya dan dalam periode waktu tertentu ada promosi kenaikan jenjang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud menemukan kebenaran (Rachman, 1999: 2). Penemuan kebenaran melalui kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungkapkan gejala-gejala secara holistik-kontekstual (penyeluruhan dan sesuai konteks).

Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2009: 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis adalah suatu pengumpulan data secara kaya dari suatu fenomena yang ada untuk dianalisis, sehingga diperoleh gambaran terhadap apa yang sudah diteliti. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, tingkah laku.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang. Adapun alasan pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang dari waktu ke waktu mulai pemilu 1999, 2004 dan 2009 berhasil mempertahankan serta mampu terus meningkatkan massa pendukungnya di Kabupaten Semarang.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas atas dasar fokus penelitian. Fokus penelitian membantu bagi penelitian kualitatif dalam membuat keputusan untuk membuang atau menyimpan informasi yang diperolehnya (Rachman, 1999: 121).

Fokus penelitian merupakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian, yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD PKS Kabupaten Semarang.

3. Upaya mengatasi kendala dalam pendidikan politik oleh DPD PKS Kabupaten Semarang.

D. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas, yang disebut informan, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2009: 157). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah unsur Pimpinan PKS Kabupaten Semarang yang terdiri dari:

- a. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang;
- b. Sekretaris umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang;
- c. Wakil sekretaris bidang administrasi, data dan informasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang.

Serta informan lain yang mengikuti pendidikan politik kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder untuk memperoleh sumber data sekunder penulis menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, arsip dan dokumen resmi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan.

E. Metode Pengumpulan Data

Salah satu unsur yang penting dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data karena unsur ini mempengaruhi langkah-langkah berikutnya sampai dengan penarikan kesimpulan, oleh karena itu untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka harus digunakan teknik yang tepat untuk memperoleh data yang benar sesuai dengan kenyataan.

Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan secara langsung dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009: 186).

Metode wawancara mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu diantaranya wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Format wawancara yang digunakan dapat bermacam-macam dan format itu dinamakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara itu dapat juga berbentuk terbuka, pertanyaan-pertanyaan ini disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur. Keuntungan wawancara terstruktur adalah jarang mengadakan pendalaman pertanyaan yang dapat mengarahkan terwawancara agar tidak sampai berdusta.

Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur. Pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, akan tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden (Moleong, 2009: 190-191).

Dilihat dari pengertian wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, maka jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Karena disini pewawancara yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan disusun terlebih dahulu sebelum diajukan. Pertanyaan-pertanyaan disusun didasarkan atas

masalah dalam rancangan penelitian. Data yang diungkap adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara dengan orang-orang yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang yang ada dalam format wawancara dan data yang diperoleh disimpan dalam bentuk catatan.

Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang, Sekertaris umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wakil sekretaris bidang administrasi, data dan informasi Partai keadilan Sejahtera (PKS), dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD PKS Kabupaten Semarang.

Wawancara digunakan untuk mengungkap data dan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang, kendala-kendala apa yang dihadapi oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan Pendidikan politik. Data dan informasi yang akan diungkap ialah mengenai:

- a. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan politik.
- b. Pendidikan politik tersebut sudah diprogramkan atau belum.
- c. Kapan pelaksanaan pendidikan politik serta intensitas pendidikan politik dilakukan.

- d. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan politik
 - e. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pendidikan politik
2. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit dalam arti apabila terjadi suatu kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.

F. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila penelitian melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.

Untuk menetapkan validitas data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data.

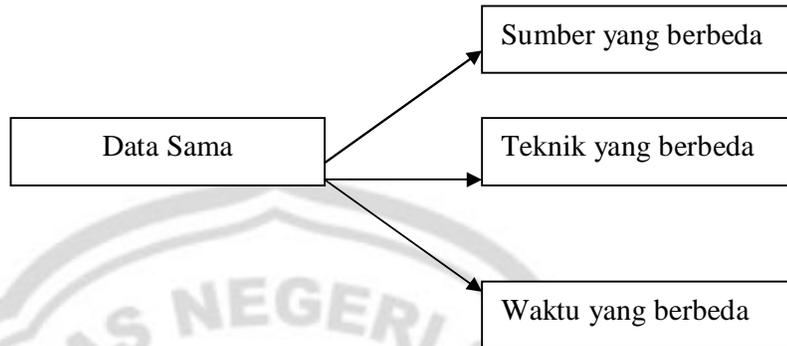
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu (Moleong, 2009: 330).

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, memanfaatkan penggunaan sumber dan metode yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi serta dengan pengecekan penemuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data. Sesuatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikataka secara pribadi;
4. Membandingkan keadaan pada perspektif seseorang dengan berbagai pendapat orang lain;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang berkaitan (Patton dalam Moleong, 2009: 330).

Dengan menggunakan dua teknik triangulasi di atas dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar sah, karena kedua teknik triangulasi di atas sangat sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif.

Bagan triangulasi pada pengujian validitas data dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1. Bagan Triangulasi pada Pengujian Validitas Data.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2009: 280).

Dari rumusan tersebut di atas dapat diketahui bahwa analisis data bermaksud pertama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen berupa laporan, foto, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberikan kode, dan mengategorikannya (Moleong, 2009: 280).

Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data *õkasarõ* yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan dapat diverifikasi.

3. Penyajian data

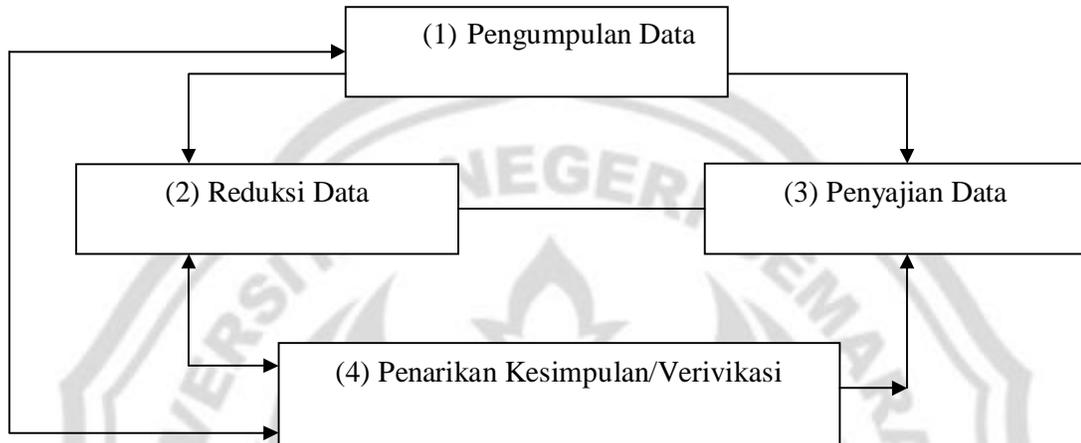
Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom-kolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang dimaksudkan dalam kotak-kotak matriks.

4. Verifikasi data

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau

sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

Tahap analisis data dapat dilihat bagan berikut ini:



Bagan 2. Tahap Analisis Data.

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data (Milles dalam Rachman, 1999: 110).

H. Prosedur Penelitian

Sebagaimana pendapat Bogdan (1972) dalam (Moleong, 2009: 126) bahwa tahap-tahap penelitian kualitatif salah satu ciri pokoknya adalah peneliti menjadi alat penelitian. Tahapan diupayakan berurutan dan fleksibel yaitu tahap pra lapangan, studi lapangan dan analisis data. Mengikuti alur tersebut, maka langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Lapangan
 - a. Menetapkan dan merumuskan permasalahan (sesuai dengan ruang lingkup tersebut), kemudian menyusun rancangan penelitian, termasuk pedoman wawancara.
 - b. Menelaah bahan-bahan pustaka atau literatur yang relevan dengan penelitian, khususnya mengenai konsep pendidikan politik, peran partai politik dalam melaksanakan fungsinya dalam pendidikan politik. Seiring dengan kajian pustaka tersebut peneliti juga berdiskusi dan berkonsultasi dengan pembimbing untuk mendapatkan masukan dan arahan.
2. Tahap Studi Lapangan
 - a. Menghubungi informan awal untuk mendapatkan masukan dan informasi awal mengenai obyek yang hendak diteliti.
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari lapangan.
3. Tahap Analisis Data dan Laporan Hasil Penelitian

- a. Menganalisis dan memberikan interpretasi data yang telah diolah dengan analisis deskriptif.
- b. Membuat draf laporan, mendiskusikan dengan pihak-pihak terkait, dan menyusun laporan akhir skripsi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum

a. Deskripsi Kabupaten Semarang

Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang terletak di Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, yaitu tepatnya di Jalan Terbayan Utara No. 8 Ungaran.

Ungaran yang merupakan ibu kota Kabupaten Semarang merupakan lokasi yang strategis bagi kegiatan kepartaian dimana setiap kegiatan Dewan Pimpinan Daerah terpusat di ibu kota kabupaten. Wilayah kerja Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Semarang.

Ibukota Kabupaten Semarang terletak di Kota Ungaran. Kabupaten Semarang terletak pada tempat yang cukup strategis, yaitu terletak di akses jalan negara yang menghubungkan beberapa kota, antara lain ibu kota provinsi yaitu Kota Semarang dengan kota lainnya antara lain Kota Solo dan Yogyakarta atau yang lebih di kenal dengan *ōJOGLO SEMARō*.

Kabupaten Semarang terdiri atas 19 kecamatan, yang dibagi lagi atas 208 desa dan 27 kelurahan. Untuk lebih lengkapnya disajikan tabel, sebagai berikut.

Tabel 2 Daftar Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Semarang

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Ungaran Barat	6	5
2.	Ungaran Timur	5	5
3.	Bergas	9	4
4.	Pringapus	8	1
5.	Bawen	10	2
6.	Bringin	16	-
7.	Tuntang	16	-
8.	Pabelan	17	-
9.	Bancak	9	-
10.	Suruh	17	-
11.	Susukan	13	-
12.	Kaliwungu	11	-
13.	Tengaran	15	-
14.	Getasan	13	-
15.	Banyubiru	10	-
16.	Sumowono	16	-
17.	Ambarawa	7	9
18.	Jambu	11	-
19.	Bandungan	9	1
JUMLAH		208	27

Sumber: BPS Kabupaten Semarang

b. Deskripsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang

1) Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sejalan dengan dinamika ditingkat nasional maupun provinsi, PKS Kabupaten Semarang pun mengalami dinamika serupa baik pergantian nama dari Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera, perubahan struktur maupun kiprah kelembagaan serta kader yang menjadi anggota legislatif.

PK Kabupaten Semarang dilantik dan diresmikan pada tanggal 20 September 1998, pada waktu itu ditunjuk Yusuf Khoirudin, A.Md sebagai Ketua, Ahmad Hani, S.Pd sebagai Sekertaris dan Joko Purwanto, SH sebagai bendahara partai. Dinamika PK Kabupaten Semarang menjelang pemilu 1999 sejalan dengan kebijakan partai secara nasional, yang antara lain meliputi proses pengenalan partai dilakukan melalui *Direct Selling* (pengenalan partai dari rumah kerumah), bakti sosial maupun Training Orientasi Pengenalan (TOP) Partai bagi para tokoh masyarakat. Dengan kerja keras dan keterlibatan berbagai komponen masyarakat terutama tokoh agama sehingga pada pemilu tahun 1999 PK Kabupaten Semarang memperoleh suara sebesar 4.034 suara sehingga memperoleh jatah satu kursi di DPRD Kabupaten Semarang. Salah satu keunggulan PK yang saat ini juga menjadi keunggulan PKS adalah adanya mekanisme syuro yang menjadi kunci penetapan kebijakan partai. Sehingga

ditetapkanlah Ahmad Munib sebagai anggota legislatif dari PKS pada tahun 1999-2004.

Seiring dengan kebijakan pembentukan wadah baru bernama Partai Keadilan Sejahtera atau yang sering disebut PKS pada tingkat nasional dan provinsi, maka di Kabupaten Semarang disusun kepengurusan baru dengan Ahmad Rohim Shut sebagai ketu, Nurhadi Susilo, S.Pd sebagai sekertaris dan Muhammad Nurrofiq S.Ag sebagai bendahara. Menjelang pemilu 2004 keterlibatan tokoh masyarakat yang didorong oleh semangat membesarkan partai dakwah ini begitu besar. Kegiatan partai dan pertumbuhan struktur partai berjalan dengan cepat. Hal ini terbukti dengan banyaknya tokoh masyarakat yang bergabung dalam kepengurusan maupun program kerja-kerja partai.

Pada pemilu 2004 tersebut PKS Kabupaten Semarang memperoleh jumlah suara sebesar 30.370 dan berhasil mendudukan 5 anggota legislatif di DPRD Kabupaten Semarang. Mereka adalah Dahlan Murdani, A.Md yang berasal dari Dapil I, Dra. Husni Anisah dari Dapil II, dr. H. Anis Supriyadi dari Dapil III, Nur Fathan, SH dari Dapil IV dan Agus Warsito dari Dapil V.

Pada pemilu 2009 yaitu pemilu yang ketiga diikuti Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang berhasil memperoleh 37.159 suara dan berhasil menempatkan 4 anggota legeslatif di DPRD Kabupaten Semarang. Mereka adalah Joko Widodo yang

berasal dari Dapil I, Dra Husni Anisah dari Dapil II, Nur Fathan, SH dari Dapil IV dan Agus Warsito dari Dapil V.

2) Logo



Gambar 1 Logo PKS

Deskripsi visual gambar:

a) Kotak Persegi Empat

Logo PKS menampilkan lambang berbentuk kotak persegi empat yang mempunyai makna kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan dan persatuan arah.

b) Bulan Sabit

Dalam logo PKS menampilkan gambar bulan sabit, yang mempunyai makna kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah.

c) Untaian 17 butir padi

Untaian 17 (tujuh belas) butir padi yang terdapat dalam logo PKS menggambarkan sifat adil, *ukhuwah*, *istiqamah*,

berani, tegas, dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.

d) Warna Lambang Partai

Warna-warna yang terdapat dalam logo PKS melambangkan :

- (1) Putih, melambangkan suci, mulia dan bersih
- (2) Hitam, melambangkan aspiratif, akomodatif, dan kepastian
- (3) Kuning emas, melambangkan kecemerlangan, kebahagiaan dan kejayaan.

3) Visi dan Misi

a) Visi Umum

Sebagai partai dakwah penegak sistem Islam dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa.

b) Visi Khusus

Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani, yakni:

- (1) Menjadi unsur perekat dan pengarah kesatuan umat dan bangsa.
- (2) Menjadi wadah pendidikan politik bagi umat islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, sekaligus tangga menuju kepemimpinan nasional.

- (3) Menjadi pelopor pengembangan kultur pelayanan dalam tradisi politik Indonesia.
- (4) Menjadi dinamisator pembelajaran bagi bangsa Indonesia
- (5) Menjadi akselerator bagi terwujudnya masyarakat madani di Indonesia.

c) Misi

- (1) Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kadernya-kadernya sebagai *anashirut taghyir* (elemen penggerak perubahan).
- (2) Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang islami di berbagai bidang sebagai *markazut taghyir* (pusat-pusat perubahan masyarakat)
- (3) Membangun opini umum yang islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam.
- (4) Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
- (5) Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu.
- (6) Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerja sama dan *ishlah* dengan berbagai unsur atau kalangan umat islam untuk terwujudnya *ukhuwah islamiyah* dan *wihdatul ummah*.

(7) Ikut memberikan kontribusi positif dalam pembelaan terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

4) Landasan Filosofis

Pendirian partai ini didasari oleh sebuah keyakinan bahwa Islam adalah ajaran yang luas meliputi seluruh bidang kehidupan. Salah satunya adalah melalui institusi politik yang mempunyai kekuatan untuk ikut andil dalam gerakan perbaikan bangsa dengan menjadi kontributor kebijakan pemerintah.

Politik sebagai bagian dari universalitas ajaran Islam menjadi tanggungjawab setiap muslim dalam tataran yang tidak hanya bersifat ibadah saja, melainkan juga hubungan manusia dengan manusia, dan juga hubungan manusia dengan Allah. Sehingga tak akan pernah lepas dari tanggung jawab mengatur, memelihara dan sebagainya. Maka partai lahir dan tumbuh berkembang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, namun lebih berorientasi pada perluasan dakwah dalam rangka mengembalikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.

5) Prinsip Kebijakan

Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh PKS terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Dakwah. Sedangkan dakwah yang diyakini PKS adalah *da'wah rabbaniyah* yang *rahmatan lil'alam*, yaitu da'wah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan da'wah yang ditujukan kepada seluruh

umat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah dakwah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan ummat manusia, jauh dari bentuk-bentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas. Atas dasar itu maka dakwah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Ia juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak dakwah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya.

a) *Al-Syumuliyah* (lengkap dan integral)

Sesuai dengan karakteristik dakwah Islam yang *syamil*, maka setiap kebijakan partai akan selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, memandangnya dari berbagai perspektif, dan mensinkronkan antara satu aspek dengan aspek lainnya.

b) *Al-Ishlah* (reformatif)

Setiap kebijakan, program, dan langkah yang ditempuh Partai selalu berorientasi pada perbaikan (*ishlah*), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan perbaikan pemerintahan dan negara. dalam rangka meninggikan kalimat Allah, memenangkan syariat-Nya, dan menegakkan daulah-Nya.

c) *Al-Syar'iyah* (konstitusional)

Syari'ah yang berisi hukum-hukum Allah SWT telah menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain (*hablun min al-nas*). Menjunjung tinggi syari'ah, ketundukan, dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kewajiban setiap muslim sebagai konsekuensi keimanannya. Komitmen itu wujud dalam bentuk keteguhan (*al-istimsak*) kepada *al-haq*, bulat hati dan percaya penuh kepada Islam sebagai ajaran yang lurus dan komprehensif yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan tetap menjaga fleksibilitas sebagai ciri dari syari'at Islam serta mempertimbangkan aspek legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Demi terwujudnya makna kemerdekaan sejati semua peraturan yang ada dalam Al- Quran dan As-Sunnah menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik. Sebab kemandirian referensi syari'at pada kekuasaan negara dan penegak hukum memberikan jaminan penting dalam merealisasikan amanah dan melawan kedhaliman.

d) *Al-Wasathiyah* (moderat)

Masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat "tengah" (*ummatan wasatha*). Simbol moralitas masyarakat

Islam tersebut melahirkan perilaku, sikap, dan watak moderat (*wasathiyah*) dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. *Al-wasathiyah* yang telah menjadi ciri Islam baik dalam aspek-aspek *nazhariyah* (teoritis) dan *'amaliyah* (operasional) atau aspek *tarbiyah* (pendidikan) an *tasyri'iyah* (perundang-undangan) harus merefleksi pada aspek ideologi ataupun *tashawwur* (persepsi), ibadah yang bersifat ritual, akhlak, adab (tatakrama), *tasyri'* dan dalam semua kebijakan, program, dan perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera.

e) *Al-Istiqomah* (komit dan konsisten)

Oleh sebab berpegang teguh kepada ajaran dan aturan Islam merupakan ciri seorang muslim maka komitmen dan konsistensi kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setiap gerakannya. Konsekuensinya seluruh kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional partai harus *istiqamah* (taat asas) yang ditemukan dalam keseluruhan tata alamiah dan dalam keseluruhan proses sejarah (ayat-ayat *kawniyat-Nya*), dalam Kitab-kitab-Nya (ayat-ayat *qawliyat-Nya*) dan dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam konsensus ummat, serta dalam elaborasi tertulis oleh para mujtahid yang berkompeten mengeluarkan hukum-hukum terhadap masalah yang benar-benar tidak ditemukan secara tekstual dalam Risalah orisinal

(al-Qur`an dan al-Sunnah). Konsistensi menuntut kontinuitas (*al-istimrar*) dalam gerakan dalam arti adanya kesinambungan antara kebijakan dan program sebelumnya.

f) *Al-Numuw wa al-Tathawwur* (tumbuh dan berkembang)

Konsistensi yang menjadi watak Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh melahirkan stagnan bagi gerakan dan kehilangan kreatifitasnya yang orisinal. Maka prinsip *alnumuw wa al-tathawwur* (pertumbuhan yang bersifat vertikal dan perkembangan yang bersifat horizontal) harus menjadi prinsip gerakannya dengan tetap mengacu kepada kaidah yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu Partai dalam kebijakan, program dan langkah-langkah operasionalnya harus tetap konsen kepada pengembangan potensi SDM hingga mampu melakukan eksalarasi mobilitas vertikal dan perluasan mobilitas horizontal.

g) *Al-Tadarruj wa Al-Tawazun* (bertahap, seimbang, dan proporsional)

Pertumbuhan dan perkembangan gerakan da'wah partai mesti dilalui secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di jagat raya ini. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan kebertahanan dan keseimbangan. Kebertahanan dan keseimbangan merupakan tata alamiah yang tidak akan mengalami perubahan. Manusia secara fitrah

tercipta dalam kebertahapan dan keseimbangan yang nyata. Maka semua tindakan manusia, lebih-lebih tindakan politik, yang berupaya memisahkan diri dari kebertahapan, keserasian dan keseimbangan akan berakibat pada kehancuran yang karenanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan bagi kemanusiaan dan lingkungan sejagat. Oleh sebab itu kebertahapan dan keseimbangan (*tadarruj dan tawazun*) harus melekat dalam seluruh kiprah Partai, baik dalam kiprah individu fungsionaris dan pendukungnya ataupun kiprah kolektifnya.

- h) *Al-Awlawiyat wa Al-Mashalahah* (skala prioritas dan prioritas kemanfaatan)

Efektivitas sebuah gerakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan gerakan tersebut dalam menentukan prioritas langkah dan kebijakannya. Sebab segala sesuatu mempunyai saat dan gilirannya. Amal perbuatan memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat pula, dari yang bersifat strategis, politis, sampai ke yang bersifat taktis. Prinsip *al-awlawiyat* dalam gerakan pada hakikatnya refleksi dari budaya berpikir strategis. Oleh sebab itu kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya didasarkan kepada visi dan misi partai. Prinsip *al-awlawiyat* dapat melahirkan efisiensi dan efektifitas gerakan. Di samping itu, Partai Keadilan Sejahtera yakin bahwa sebaik-

baik muslim adalah yang paling bermanfaat bagi kepentingan manusia. Maka pada hakikatnya *mashlahah ummah* menjadi dasar dan prinsip dalam kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya. Untuk itu ia akan tetap konsisten terhadap semua persoalan yang dihadapi ummat. Kepentingan umat selalu menjadi pertimbangan dan prioritas. Maka baik dalam kebijakan ataupun dalam sikap dan operasional harus selalu memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan ummat. Kepentingan umat harus diletakkan di atas kepentingan kelompok dan individu.

i) *Al-Hulul* (solusi)

Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan namanya, ia memperjuangkan aspek-aspek yang yang tidak hanya berhenti pada janji, teori maupun kegiatan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh ummat. Keadilan dan kesejahteraan haruslah diperjuangkan dengan *ihsan* dan *itqon* (profesional), itulah yang mengharuskan partai dan aktivisnya mengarahkan aktivitas dan program partai untuk menjadi solusi dan merealisirnya di setiap aktivitas yang mereka tempuh.

j) *Al-Mustaqbaliyah* (orientasi masa depan)

Pada kenyataannya tiga dimensi waktu (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang) merupakan realitas yang saling berhubungan. Disadari, sasaran dakwah yang akan diwujudkan

merupakan sasaran besar, yaitu tegaknya agama Allah di bumi yang menyebarkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia, yang bisa jadi yang akan menikmati keberhasilannya adalah generasi mendatang. Maka seyogyanya setiap kebijakan yang diambil dan program-program yang dicanangkan mengaitkan ketiga dimensi waktu tersebut. Masa lalu sebagai pelajaran, masa kini sebagai realitas, dan masa depan sebagai harapan. Keadaan yang kita geluti sekarang merupakan refleksi masa lalu kita dan sekaligus akan menentukan masa depan kita. Maka sangat bijak kalau kebijakan, program, dan langkah-langkah yang ditempuh tidak mengenyampingkan ketiga dimensi waktu tersebut dan selalu berorientasi pada masa depan, tidak hanya memikirkan nasib kita sekarang ini.

k) *Al-'Alamiyah* (bagian dari dakwah sedunia)

Pada hakikatnya gerakan da'wah Islamiyah, baik tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, bersifat '*alamiyah* (mendunia) sejalan dengan universalitas Islam. Hal itu telah menjadi *sunnatudda'wah*. Ia merupakan aktivitas yang tidak kenal batas etnisitas, negara, atau daerah tertentu. Kenyataan itu menegaskan bahwa eksistensi dakwah kita merupakan bagian dari *da'wah 'alamiyah*. Oleh sebab itu prinsip kebijakan da'wah kita tidak lepas dari kebijakan dan gerakan dakwah

sedunia. Adalah suatu kemestian setiap kebijakan yang diambil, program yang dicanangkan, dan langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan kebijakan dakwah yang bersifat alami dan tunduk pada *sunnatudda'wah* tersebut dengan tidak melikuidasi persoalan khas yang dihadapi di masing-masing wilayah.

6) Prinsip dasar

Sebagai sebuah intitusi kepartaian yang memiliki agenda politik, ada beberapa prinsip dasar yang menjadi pegangan Partai Keadilan Sejahtera yaitu, sebagai berikut:

- a) Keadilan, persamaan dan keseimbangan adalah pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak politik dan sosial setiap manusia yang memiliki kedudukan hukum dan undang-undang yang sama, meski berbeda suku, warna kulit dan agama, baik laki-laki maupun perempuan.
- b) Kesatuan nasional, yaitu memperkokoh struktur negara sambil tetap menjaga integritas dan persatuan nasional. Memandang pluralitas rakyat dan realitas hukum serta kekayaan alam sebagai kenyataan alamiah yang harus dihormati secara proporsional.
- c) Kemajuan, adalah membangun kesadaran sejarah, kesadaran tentang realitas dan kesadaran tentang keharusan melakukan

perbaikan sebagai perwujudan kewajibannya sebagai makhluk moral dalam melaksanakan misi untuk membangun peradaban.

d) *Khidmatul Ummah* demi persatuan, adalah upaya untuk menjadi jembatan berbagai kelompok, organisasi atau partai-partai Islam untuk mewujudkan persatuan umat.

e) Kerjasama internasional, yaitu menjalin interaksi bangsa lain dalam rangka manandakan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang damai, mengakui hak-hak bangsa-bangsa dalam kehidupan bersama yang saling menghormati dan saling bekerja sama untuk meningkatkan kemajuan, pertumbuhan dan pemakmuran bumi yang dilandaskan rasa keadilan.

7) Struktur Kepengurusan

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah lembaga eksekutif partai di tingkat kabupaten/kota. Kepengurusan DPD PKS Kabupaten Semarang terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa Ketua Bidang, seorang Sekretaris Umum dan beberapa Wakil Sekretaris Umum dan seorang Bendahara Umum dan seorang wakil Bendahara Umum.

Susunan pengurus DPD PKS Kabupaten Semarang Periode 2010-2015, terdiri atas:

Ketua Umum : Joko Widodo

Sekretaris Umum : Ahmad Rifa'i

Wasekum bidang administrasi,
data & informasi : Erfani, A.Md

Wasekum bidang media &
komunikasi politik : M. Sugiharto, S.Sos

Wasekum bidang protokoler,
rumah tangga & arsip : Nur Yulianto

Bendahara Umum : Parjono, S.Pt

Wakil Bendahara Umum1 : Suwartin, S.Ag

Bidang Kaderisasi : Agus Setiawan

Bidang Pembangunan Keummatan : Nur fathan, SH

Bidang Kebijakan Publik : Agus Warsito, SE

Bidang Kepanduan dan Olah raga : Fajar Farianto

Bidang Generasi Muda dan Profesi : Maria Septriana

Bidang Jaringan Buruh, Petani
dan Nelayan : Isna Agung I, Sp

Bidang Kelembagaan Sosial : Muh. Cahyono

Bidang Pengembangan Ekonomi
Kewirausahaan : M. Isoni, A.Md

Bagian investasi & pembiayaan : Sri Suwarsi, A.Md

Bagian Keperempuanan : Kustantina, A.Md

Bagian Ketahanan Keluarga : Nurul Hidayah, S.Pd

: Ana Chusnayatun

Bagian Peningkatan Kapasitas

Kader Perempuan : Musyarofah, S.Pd

Bagian Kajian Perempuan,

Anak & Keluarga : Siti Rofiqah, S.Pd

: Sri Lestari, A.Md

Badan Pemenangan Pemilu : Nurhadi Susilo, S.Pd

8) Anggota atau kader PKS Kabupaten Semarang.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang merupakan lembaga eksekutif partai di tingkat kabupaten/kota, yang membawahi beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kecamatan. Jumlah anggota atau kader Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang yang telah tercatat di DPD sekitar 226 kader yang tersebar di seluruh DPC se-Kabupaten Semarang. Diungkapkan wakil sekretaris bidang administrasi, data dan informasi Erfani:

“Kader yang sudah tercatat merupakan anggota inti yang terdiri dari madya, dewasa, ahli dan purna. Sedangkan anggota pendukung yang jumlahnya cukup banyak belum tercatat di DPD PKS Kabupaten Semarang (wawancara, 29 Juli 2011).

Kader yang tercatat merupakan kader inti yang berdasarkan jenjang keanggotaan termasuk dalam anggota Madya, Dewasa, Ahli dan Purna. Sedangkan untuk kader pendukung yang meliputi anggota Pemuda dan Muda belum tercatat di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang. Daftar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan

Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Kabupaten Semarang sebagai berikut.

Tabel 3 Daftar DPC dan DPRa Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Kabupaten Semarang

No.	DPC	DPRanting
1.	Ungaran Barat	11
2.	Ungaran Timur	6
3.	Bergas	9
4.	Pringapus	8
5.	Bawen	11
6.	Bringin	9
7.	Tuntang	8
8.	Pabelan	10
9.	Bancak	4
10.	Suruh	10
11.	Susukan	7
12.	Kaliwungu	10
13.	Tengaran	6
14.	Getasan	9
15.	Banyubiru	7
16.	Sumowono	11
17.	Ambarawa	13
18.	Jambu	8
19.	Bandungan	7
JUMLAH		164

Sumber: DPD PKS Kabupaten Semarang

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dibantu oleh perangkat yang bernama Cabang Dakwah (CD), Cabang Dakwah merupakan perangkat kerja di bawah DPD yang bertugas melakukan koordinasi antar DPC. Cabang dakwah dibagi berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) pada pemilu, sehingga terbentuk 5 Cabang Dakwah yang mengkoordinasi beberapa DPC di wilayah kerjanya.

9) Program kerja PKS Kabupaten Semarang

Secara umum program kerja DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang merujuk pada visi misi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang masa bakti 2010-2015, sehingga program kerja disusun sesuai dengan visi misi PKS, yaitu mencapai target 3 besar, dengan perolehan 8 kursi dewan di Kabupaten Semarang pada pemilu 2014. Ketua DPD PKS Kabupaten Semarang, Joko Widodo menyampaikan:

“Bahwa program kerja disusun sesuai dengan visi misi PKS, yaitu upaya untuk mencapai target 3 besar, dengan perolehan 8 kursi dewan di Kabupaten Semarang pada pemilu 2014 yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan kerja keras kaderö (Wawancara, 29 Juli 2011).

Berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang yang diselenggarakan pada 28-29 Mei 2011, maka disusunlah program kerja DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang tahun 2011-2015, sebagai berikut.

- a) Program kerja bidang kaderisasi
- b) Program kerja pembangunan Keummatan
- c) Program kerja bidang generasi muda dan profesi
- d) Program kerja bidang kependuan dan olahraga
- e) Program kerja bidang kelembagaan sosial
- f) Program kerja bidang pembangunan ekonomi dan kewirausahaan

- g) Program kerja bidang keperempuanaan
- h) Program kerja bidang kebijakan publik
- i) Program kerja Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu)

2. Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang.

a. Program Pendidikan Politik DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang

Dalam sebuah partai politik Anggaran Dasar (AD) merupakan kebijakan tertinggi dalam partai yang menjadi pedoman bagi peraturan di bawahnya dalam melaksanakan aktivitas politik partai. Sementara Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan aturan yang menjabarkan lebih lanjut mengenai isi dari Anggaran Dasar partai politik tersebut. Tak terkecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anggaran Dasar (AD) dijadikan rujukan oleh partai bagi pelaksanaan kegiatan partai. Sehingga dapat dikatakan Anggaran Dasar memberi arahan kepada partai tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan partai.

Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik terutama bagi anggota atau kadernya, dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak dijelaskan secara tegas mengenai pendidikan politik, akan tetapi dari beberapa pasal dalam Anggaran Dasar tersirat mengenai pelaksanaan pendidikan politik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengaturan tentang masalah keanggotaan partai, selanjutnya ketentuan mengenai keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

(ART). Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tersebut mengenai sistem dan prosedur keanggotan serta jenjang keanggotaan partai.

Dalam melaksanakan amanat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) perlu adanya program kerja yang bersifat teknis yaitu program kerja yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan aktivitas politik partai. Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan salah satu kekuatan politik yang cukup diperhitungkan dalam kancah politik di tingkat nasional maupun daerah, memandang perlu adanya program kerja yang dapat menopang eksistensi serta kemajuan partai yang salah satu program kerja berkaitan dengan pendidikan politik.

Program kerja Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kader atau anggota dimulai dari struktur organisasi terendah yaitu tingkat ranting sampai pada tingkat pusat serta pendidikan politik bagi masyarakat yang belum menjadi anggota atau kader partai. Program kerja yang berkaitan dengan pendidikan politik di DPD PKS Kabupaten Semarang meliputi berbagai kegiatan antara lain dibidang kaderisasi, pembangunan keummatan, dan kebijakan publik. Semua kegiatan tersebut di susun dalam program kerja partai yang meliputi program bulanan, program tahunan serta program yang sifatnya insidental.

Berikut ini mengenai program kerja Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hasil Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) tahun 2011 yang berkaitan dengan pendidikan politik, berdasarkan dokumentasi yang ada sebagai berikut.

1) Bidang kaderisasi

Dibidang kaderisasi sesuai dengan musyawarah kerja daerah (Muskerda) 2011 DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang memfokuskan program kerja selama 5 tahun ke depan untuk bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas kader-kadernya, serta menargetkan dapat merekrut 3500 kader baru. Dalam upaya mencapai target tersebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang memiliki berbagai cara, metode dan strategi untuk terus meningkatkan kualitas kader serta meningkatkan dukungan dari pemilih. Metode tersebut antara lain melalui kegiatan:

a) pelatihan dan pembinaan

Pelatihan dan pembinaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baik tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan pimpinan Cabang (DPC) maupun Dewan Pimpinan Ranting (DPRa). Kegiatan *training* atau pelatihan diberikan kepada anggota kader pendukung yang terdiri dari anggota pemula dan anggota muda serta masyarakat umum. Pelatihan biasanya berupa

kegiatan, Training Orientasi Pengenalan (TOP) partai merupakan bentuk kegiatan pelatihan bagi calon anggota partai, yang tujuannya memperkenalkan visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera bagi calon anggota atau masyarakat. Ta'dim Rutin Partai (TRP) merupakan bentuk kegiatan lanjutan pelatihan peningkatan kualitas bagi anggota partai yang terdiri dari anggota pemula dan anggota muda, tujuannya meningkatkan kualitas anggota partai serta mampu memahami visi misi partai dan kiprah Partai Keadilan Sejahtera dalam konstelasi politik nasional.

Pembinaan atau *tarbiyah* merupakan salah satu proses pembentukan SDM (*Syakhshiyah Da'iyah Mutakamilah* atau Kepribadian Muslim Yang Sempurna) yang bersifat *ilzami* (menuntut) melalui pembekalan *'ulum islamiyyah* (ilmu-ilmu keislaman) kepada seluruh kader-kader da'wah (partai) sesuai dengan *tsaqofi* (wawasannya). Pembinaan diberikan kepada para anggota kader inti yang meliputi anggota madya, dewasa, ahli dan purna. Dalam Muskerda (Musyawarah Kerja Daerah) DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang tahun 2011, mengenai sarana *tarbiyah* antara lain MABIT (Malam Bina Iman dan Taqwa), *Jalsah Ruhiyah* dan *Rihlah* pengurus, fraksi, pejabat publik dan DPC.

b) *nadwah* atau seminar

Seminar merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan politik bagi anggota maupun masyarakat. Kegiatan *nadwah* atau seminar merupakan forum diskusi untuk mengkaji suatu permasalahan dan memberikan pemecahan masalah serta mengambil keputusan dalam menyikapi permasalahan tersebut, yang diikuti baik anggota maupun masyarakat umum. Seminar dengan mengangkat tema isu-isu maupun fenomena-fenomena yang berkembang dalam masyarakat yang tidak hanya dalam bidang politik saja akan tetapi juga seluruh bidang kehidupan. Kegiatan *nadwah* atau seminar mempunyai muatan pendidikan politik yang terkandung didalamnya, yaitu terbentuknya pemahaman yang luas atas berbagai ragam masalah politik dan problematika masyarakat melalui dialog dengan berbagai macam latar belakang pemikiran dari berbagai disiplin ilmu, selain itu juga memberikan pengenalan berbagai ragam metodologi praktis untuk menyelesaikan persoalan dari berbagai sudut pandang kepada kader maupun masyarakat.

c) *tatsqif* atau kajian

Tatsqif atau kajian yaitu aktivitas untuk memperluas wacana dan intelektual anggota, diantaranya *tatsqif* yang membahas masalah ke-Islaman, *tatsqif siyasi* (politik) yang membahas masalah-masalah politik, dan lain sebagainya.

Kegiatan kajian ini biasanya terdiri dari beberapa anggota maupun masyarakat yang dipimpin oleh seorang ustadz. Kegiatan kajian ini biasanya dilaksanakan setiap pekanan atau dua pekanan dan dilaksanakan di masjid maupun di rumah peserta kajian secara bergiliran. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan politik, keagamaan, keluarga dan permasalahan-permasalahan lainnya.

d) kegiatan sosial

Kegiatan sosial merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh kader PKS yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kader-kader PKS aktif melakukan berbagai aktivitas simpatik kemasyarakatan yang diharapkan dapat meningkatkan dukungan kepada mereka. Dalam rangka pengenalan program partai (*Direct Selling*) PKS dengan masyarakat, PKS juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau bakti sosial PKS.

2) Bidang pembangunan keummatan

Dibidang pembangunan keummatan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang berupaya selalu menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat melalui program kerja silaturahmi kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam upaya mencapai tujuan program kerja dibidang pembangunan keummatan dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu da'wah,

pendidikan dan kerjasama kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Pendekatan da'wah dilakukan dengan beberapa metode yang telah disusun, *pertama* pemetaan masjid yaitu upaya yang dilakukan dalam mendata masjid yang menjadi binaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang tujuannya menjadi basis da'wah dan terbentuknya majelis ta'dim dimasjid yang terdata. *Kedua*, optimalisasi lembaga da'wah (internal) yaitu kegiatan dengan mengoptimalkan lembaga da'wah dalam internal partai dengan mengadakan rapat koordinasi lembaga-lembaga da'wah. *Ketiga*, *dauroh mubaligh* yaitu pelatihan bagi *mubaligh* yang tujuannya meningkatkan kapasitas kader sebagai *mubaligh*.

Pendekatan pendidikan dilakukan dengan cara melakukan konsolidasi struktur dan lembaga pendidikan internal partai, yang tujuannya terdatanya lembaga-lembaga pendidikan dalam internal partai. Kemudian melakukan kegiatan dalam lingkup eksternal yang meliputi pendampingan lembaga-lembaga pendidikan dan membentuk lembaga pendidikan baru dari tingkat TK/PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK.

Kerjasama kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dilakukan dengan mengadakan kegiatan, *pertama* silaturahmi antar lembaga da'wah dengan oraganisasi kemasyarakatan yang tujuannya terbentuknya forum komunikasi

lembaga da'wah. *Kedua*, rekrutmen tokoh yaitu upaya untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan tokoh-tokoh baik tokoh keagamaan maupun tokoh kemasyarakatan. Tujuannya terjalin komunikasi yang efektif antara tokoh-tokoh dan partai serta terbangunnya *image* partai yang baik dalam masyarakat. Ketiga, pemberdayaan kader yaitu upaya untuk melakukan infiltrasi kader ke lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan eksternal. Tujuannya masuknya kader-kader kedalam lembaga-lembaga atau organisasi eksternal tersebut.

3) Bidang kebijakan publik

Dibidang kebijakan publik DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang berupaya memberikan pencerahan dan sosialisasi perkembangan PKS tingkat daerah dan nasional kepada masyarakat di Kabupaten Semarang melalui pemasangan spanduk dan penerbitan bulletin, *blog* dan akun *facebook*. Selain itu program kerja dibidang kebijakan publik yang di susun berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) tahun 2011, sebagai berikut.

- a) Melakukan komunikasi dengan partai yang berpengaruh, dan melakukan pertemuan secara intens. Bentuk kegiatan silaturahmi politik kepada pengurus partai di tingkat Kabupaten Semarang (tema: masalah aktual Kabupaten Semarang) dan silaturahmi kepada redaksi media massa yang

populer di wilayah Kabupaten Semarang. Tujuan terbangunnya persepsi yang sama terhadap permasalahan-permasalahan strategis dan aktual Kabupaten Semarang, serta tereksposnya kegiatan-kegiatan dan pandangan-pandangan PKS di semua bidang

- b) Membuat Kebijakan khusus untuk pengelolaan daerah unggulan, bentuk kegiatan: (1) kegiatan pembuatan *taklimat* kebijakan publik, (2) *taklimat* (seruan) kepada seluruh anggota legislatif DPRD kabupaten untuk mengoptimalkan APBD dalam bentuk aspirasi untuk penguatan DPC-DPC unggulan, (3) laporan-laporan dari seluruh anggota legislatif (tertulis untuk kegiatan tersebut). Tujuan optimalisasi peran anggota legislatif dalam menyerap serta menangkap aspirasi konstituen.
- c) Menjadikan Fraksi PKS sebagai fraksi penyambung lidah rakyat (membela kepentingan rakyat dan anti korupsi). bentuk kegiatan: (1) membuat *web site* fraksi PKS di Kabupaten Semarang, (2) anggota dewan dan struktur mengadakan silaturahmi atau sarasehan dengan masyarakat, menampung aspirasi dan advokasi persoalan di masyarakat. Tujuan aktualisasi di jejaring sosial dan media elektronik, sehingga anggota legislatif lebih familiar di masyarakat yang heterogen.
- d) Pelatihan teknis pemenangan pemilu untuk semua fungsi, bentuk kegiatan *training public speaking*, *quantum ikhlas* dan

berbicara efektif untuk struktur wilayah. Tujuan optimalisasi kapasitas struktur untuk pemenangan pemilu.

e) Membentuk basis massa komunitas khusus dan pembentukan relawan PKS, bentuk kegiatan menghidupkan kembali ormas-ormas *Underbouw* PKS di tingkat kabupaten dengan mengadakan sarasehan atau temu silaturahmi *stake holder*. Tujuan memperlebar segmen jaringan *stake holder*, ormas dan simpatisan.

f) Silaturahmi tokoh semua tingkatan (penjaringan tokoh potensial), bentuk kegiatan silaturahmi ke tokoh masyarakat tingkat kabupaten. Tujuan penjaringan tokoh-tokoh sebagai antisipasi ketatnya kompetisi pemilu 2014.

g) Sosialisasi Perda desa dan pemahaman pengelolaan APBDesa untuk optimalisasi dakwah di *Grass Root*, bentuk kegiatan: mengadakan *training* kepemimpinan untuk ketua BPD se-kabupaten. Tujuan pengokohan eksistensi PKS dalam " *bekerja untuk Kabupaten Semarang*" sampai ditingkat desa serta penguatan peran politik ketua DPRa.

h) Membuat ruang dialog disetiap level pemerintahan tentang penyelenggaraan *Good Government* dan *Clean Governence*. Bentuk kegiatan: (1) mendorong kader dan simpatisan agar terlibat lebih aktif diforum-forum pemerintahan, seperti Bintek dan sejenisnya dan bisa dipantau oleh DPD, (2) anggota

legislatif dan kader bersinergi turun ke masyarakat guna melakukan advokasi, baik melalui reses atau komunikasi intensif yang bisa dipantau oleh DPD.

- i) Membentuk permodelan *Good Government* dan *Clean Government* di tingkat kelurahan dan desa, bentuk kegiatan: (1) penempatan kader dan simpatisan di lembaga pemerintahan desa atau kelurahan minimal satu dapil kabupaten ada 2 desa atau kelurahan, (2) penempatan kader dan simpatisan di ketua RT/RW, (3) memberikan bimbingan dan bantuan kepada kader yang ada di pemerintahan desa atau kelurahan secara berkala.
- j) Memperluas basis *opinion leader*, bentuk kegiatan: (1) pendataan agenda pilkades dan pilkadus di Kabupaten Semarang, (2) pendampingan kader yang maju pilkades/pilkadus, (3) komunikasi politik ke calon eksternal dalam pilkades/pilkadus. Tujuan diketahui semua desa atau dusun yang melakukan pemilihan di tahun 2011-2014.

Melalui wawancara dengan wakil sekretaris bidang administrasi, data dan informasi Erfani, terdapat beberapa program kegiatan yang bersifat momentum yaitu bersamaan dengan datangnya bulan suci Ramadhan 1432 Hijriyah. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang sesuai arahan dan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menyusun program kegiatan

ramadhan yang melibatkan kader dan pemilih. Program kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a) pembagian jadwal Imsyakiyah oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang.
- b) mengadakan tarawih keliling oleh pengurus tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang.
- c) mengadakan buka puasa bersama masyarakat yang melibatkan anggota dewan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang.
- d) membagikan takjil jalanan, yaitu memberikan takjil kepada kaum duafa serta orang yang berada di jalanan.
- e) tarkhib ramadhan yaitu bentuk kegiatan menyambut bulan ramadhan melalui bentuk pawai ramadhan maupun kajian tentang materi-materi keislaman.
- f) sehari bersama Al-Quran, yaitu bentuk kegiatan kajian khusus tentang Al-Quran bagi kader, simpatisan maupun masyarakat umum.
- g) program spandukisasi, yaitu bentuk kegiatan dengan memasang spanduk-spanduk yang bertemakan bulan suci ramadhan.
- h) *itikhaf* atau berdiam diri di Masjid selama 10 hari terakhir bulan ramadhan.

- i) halal-bihalal antar pengurus tingkat daerah, cabang maupun ranting.

b. Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang

Pada uraian ini akan dikemukakan secara khusus program yang telah ditetapkan oleh Pengurus PKS DPD Kabupaten Semarang. Dengan melakukan pencermatan pada program secara keseluruhan yang telah ditetapkan tersebut, kemudian secara khusus perhatian diarahkan pada program yang berkaitan dengan pendidikan politik. Melalui cara ini akan diketahui perhatian PKS Kabupaten Semarang pada program-program yang berkaitan dengan pendidikan politik.

Dari program kerja DPD PKS Kabupaten Semarang dapat dinyatakan bahwa PKS sebagai partai politik yang menamakan dirinya sebagai partai da'wah, partai ini dalam kebijakannya secara serius melakukan kegiatan syiar Islam di bidang da'wah kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, disamping tetap memberikan perhatian yang sangat serius pada masalah pengkaderan. Dari sudut pandang PKS masalah pengkaderan diklasifikasikan ke dalam dua persoalan yaitu pembinaan kader yang sudah menjadi anggota partai serta perluasan jumlah kader melalui berbagai kegiatan, cara dan instrumen yang dimiliki oleh PKS Kabupaten Semarang .

Tujuan pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang yaitu untuk

mencapai sasaran yang telah ditentukan baik sasaran yang bersifat ke dalam maupun sasaran keluar. Sasaran ke dalam yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik di dalam internal partai yaitu upaya meningkatkan kemampuan dan peranan kader atau anggota partai melalui pembinaan (*tarbiyah*) sehingga dapat mewujudkan kader PKS yang bersih, peduli dan profesional sesuai dengan slogan partai serta memiliki militansi yang tinggi. Sasaran ke luar yang berkaitan dengan pendidikan politik yaitu upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang politik secara utuh dan menyeluruh.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti melalui dokumentasi dan wawancara, terungkap bahwa pendidikan politik yang dilaksanakan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang meliputi berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan, *nadwah* (seminar), *tatsqif* (kajian), sosialisasi dan kegiatan sosial. Secara lebih lengkap kegiatan pendidikan politik yang dilakukan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang.

Kegiatan pelatihan dan pembinaan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS), antara lain pada Sabtu, 11 Juni 2011, DPC PKS Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang bersama puluhan kader setempat mengadakan kegiatan Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT) yang bertempat di Masjid Jami'atul Mu'minin Desa Jubelan Kecamatan Sumowono. Dalam acara MABIT ini, disampaikan materi mengenai Manajemen Sholat Khusyuk oleh Ustadz Saiful Umar dari

Kecamatan Bandungan, acara MABIT diselenggarakan dengan tujuan memperkuat *ruhiyah* kader PKS. Agenda MABIT ini merupakan bagian dari pembekalan *ruhiyah* kader untuk menyambut peringatan Israø Miøraj di bulan Rajab dan kader PKS bersiap dengan sungguh-sungguh menyambut bulan Ramadhan. Diungkapkan Erfani:

øKegiatan MABIT (Malam Bina Iman dan Taqwa) merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh bidang kaderisasi untuk membina dan memberi penguatan dari sisi *ruhiyah* (iman, rohani) kepada para kader PKS, kegiatan ini sebenarnya rutin dilaksanakan ditiap DPC atau CD (Cabang Dakwah) setiap 2 bulan sekali namun acara MABIT di Kecamatan Sumowono ini spesial karena berbarengan dengan peringatan Israø Miøraj dan datangnya bulan Ramadhan (Wawancara, 10 Agustus 2011).

Kegiatan pelatihan dan pembinaan dilanjutkan pada hari minggu, 12 Juni 2011 dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan, Bidang Pembangunan Keummatan (BPKu) PKS Kabupaten Semarang menyelenggarakan øPelatihan Daøi yang bertempat di kompleks yayasan Nur Hidayah Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Kegiatan ini merupakan wujud dari komitmen PKS sebagai partai dakwah. Selain itu pelatihan daøi ini bertujuan untuk mempersiapkan kader PKS menjadi *muballigh* selama bulan ramadhan. Kegiatan pelatihan daøi ini diikuti oleh puluhan kader PKS dari Cabang Dakwah (CD) 1,2 dan 3, yang terdiri dari 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Ungaran Timur, Ungaran Barat, Bergas, Pringapus, Bawen, Bandungan, Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Jambu dan Kecamatan Sumowono. Kegiatan ini melibatkan beberapa pembicara, yaitu Ustadz Gatot Widodo dari Tuntang, Ustadz Ahmad Rifaøi dari Ambarawa,

Ustadz Nuryulianto dari Ungaran Barat dan Ustadz Dahlan Murdani dari Ungaran Timur. Materi pelatihan mengenai urgensi dakwah, pengelolaan majelis ta'lim dan kiat-kiat berbicara di depan umum. PKS sebagai partai dakwah memiliki program rutin pekanan yang berupa Ta'lim Rutin Partai (TRP) untuk para kadernya. Ta'lim yang berisi kajian keislaman ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman tentang keislaman dan mengupayakan pengamalannya. Diharapkan agar semua kader PKS lambat laun siap untuk menjadi da'í yang bertugas untuk mendakwahkan Islam bersama para *muballigh* lainnya. Kegiatan ini dibenarkan Erfani:

õKegiatan pelatihan Da'í ini sebenarnya dilaksanakan rutin setiap 1 tahun sekali terutama menjelang datangnya bulan ramadhan, hal tersebut dikarenakan pada bulan ramadhan banyak dibutuhkan para narasumber pada kultum, pengajian dan lainnya. Sehingga diharapkan para kader PKS yang potensial dapat menjadi Da'í paling tidak di lingkungan tempat tinggalnya, karena pada prinsipnya kader PKS harus mau merubah dirinya dan mau merubah orang lainö (Wawancara, 10 Agustus 2011).

Rangkaian kegiatan pelatihan dan pembinaan dilanjutkan dengan kegiatan MABIT (Malam Bina Iman dan Taqwa) yang diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Isra' Mi'raj pada hari senin, 28 Juni 2011 oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ungaran Barat yang bertempat di kompleks Sekolah Alam Ungaran (SAUNG) Lerep, Ungaran. Pembicara dalam acara ini Ustadz Dahlan Moerdani dan Ustadz Irfan, rangkaian kegiatan MABIT yang diikuti puluhan kader ini dimulai dengan sholat

berjamaah Isyaø yang dilanjutkan dengan Kajian dengan tema Hikmah di Balik Israø Miøraj. Disampaikan dalam pengajian tersebut bahwa seluruh kader PKS diharapkan memahami arti penting berdakwah. Berdakwah diartikan sebagai upaya perbaikan ummat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Setelah istirahat, acara dilanjutkan dengan Shalat tahajud dan witr berjamaah pada dini hari, yang dilanjutkan dengan sholat Subuh berjamaah. Seusai shalat Subuh, peserta MABIT mengikuti kajian tentang *Dzikrul Maut*, yaitu mengingat kematian. Menginjak waktu dhuha, peserta disuguhi permainan *outbound* untuk mengasah kekompakan tim dan saling memahami satu dengan lainnya. Melalui rangkaian kegiatan MABIT ini, kader PKS diharapkan semakin bersemangat dalam berdakwah. Selain sebagai sarana konsolidasi kader, MABIT ini dijadikan sebagai persiapan kader menyambut bulan ramadhan, agar benar-benar siap mengisi Ramadhan dengan kegiatan dakwah di masyarakat. Peningkatan keimanan kader mutlak diperlukan, dan kegiatan MABIT ini menjadi salah satu upayanya. Rangkaian kegiatan MABIT bersamaan dengan peringatan Israø Miøraj dilaksanakan juga oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ungaran Timur yang bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada hari Rabu, 30 Juni 2011 yang bertempat di Masjid Al Aørof, kompleks Perumahan Kutilang Sari Ungaran dengan tema

Hikmah di balik Isra' Mi'raj dan pembekalan kader menyambut bulan ramadhan. Kegiatan ini diungkapkan Erfani:

Rangkaian MABIT juga dilaksanakan oleh DPC PKS Kecamatan Ungaran Barat dan Timur, tujuannya sama untuk memberikan pembinaan dan penguatan dari sisi *ruhiyah* para kader PKS. Yang lain acara ini juga dikemas sedemikian rupa sehingga menarik serta di dokumentasikan serta rangkaian kegiatan di unggah ke *blog* PKS Kabupaten Semarang serta dokumentasi video di unggah ke *youtube* serta di *share* ke berbagai media massa di Kabupaten Semarang (Wawancara, 10 Agustus 2011).

Dalam rangka mendapatkan simpati dari masyarakat serta memberi informasi pada masyarakat tentang kegiatan politik dan syiar Islam dilaksanakan kegiatan sosialisasi oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS), antara lain kegiatan pawai ramadhan yang diselenggarakan pada hari senin, 25 Juli 2011 yang dilaksanakan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama Cabang Dakwah 1 yang terdiri dari DPC Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur dan Bergas. Kegiatan ini berjalan melewati jalan-jalan kampung yang berbukit dari kampung yang satu ke kampung lainnya, rombongan pawai ramadhan kader PKS dimulai sejak pukul 09.00 WIB pagi berkeliling mengingatkan masyarakat akan datangnya bulan Ramadhan yang suci. Dimana kegiatan ini rutin dilakukan oleh PKS Kabupaten Semarang setiap tahunnya sebagai ciri khas partai dakwah. Selama perjalanan yel-yel maupun orasi diisi secara bergantian sambil membagikan jadwal Imsakiyah beserta tips sehat puasa, tak lupa beragam souvenir juga dibagikan kepada masyarakat sekitar.

Diungkapkan Wakil Sekretaris Bidang administrasi, data, dan informasi DPD Erfani:

“Kegiatan pawai ramadhan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun menjelang datangnya bulan ramadhan, serta sesuai dengan program ramadhan yang dibuat oleh DPD PKS. Tujuannya untuk mengingatkan masyarakat akan datangnya bulan suci ramadhan sehingga dapat menyiapkan diri baik fisik, materi dan *ruhiyah* (jiwa, rohani) serta merupakan salah satu kegiatan simpatisan PKS” (Wawancara, 10 Agustus 2011).

Sebelumnya Minggu, 24 Juli 2011, DPC PKS Kecamatan Bawen bersama pimpinan DPD PKS Kabupaten Semarang menyelenggarakan *Tarhib* Ramadhan 1432 H. bertempat di Masjid Baitul Muhsinin, Ngancar Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Kegiatan berlangsung pukul 09.00-12.00 WIB dihadiri oleh Pengurus DPC, DPRa dan seluruh kader di Kecamatan Bawen. Materi disampaikan oleh Ustadz Isnan Anshori, S.Pd.I dari Jakarta yang menyampaikan tentang berbagai persiapan yang harus dilakukan dalam menghadapi bulan ramadhan serta cara menyikapi perbedaan yang terjadi dimasyarakat. Ketua DPC PKS Kecamatan Bawen sekaligus sebagai Wakil Sekretaris Bidang administrasi, data, dan informasi DPD Kabupaten Semarang Erfani mengatakan:

“*Tarhib* ramadhan merupakan salah satu program PKS dibulan ramadhan acara ini dilakukan sebelum datangnya bulan ramadhan sama halnya pawai ramadhan yang telah dilakukan, kegiatan ramadhan ada yang sebelum, pas bulan ramadhan dan setelah akhir ramadhan. Kegiatan ini penting dilakukan untuk menyadarkan umat Islam agar mempersiapkan dirinya dalam menghadapi bulan ramadhan dengan bekal yang cukup diantaranya bekal *Ruhiyah*, *Fikriyah* dan *jasadiyah* sehingga

dapat mengoptimalkan ibadah di bulan ramadhan (wawancara, 10 Agustus 2011).

Bentuk sosialisasi lain yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah kegiatan pemasangan spanduk sebagai metode pendidikan politik yang bersifat massal harapannya masyarakat akan lebih mengenal serta bersimpati pada Partai Keadilan sejahtera (PKS). Bersamaan dengan datangnya bulan ramadhan serta program pemunculan tokoh kader PKS di daerah, di pasang sejumlah spanduk yang bertemakan "Bulan Suci Ramadhan" dan menampilkan foto sosok kader PKS Kabupaten Semarang diseluruh DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang dan di lokasi-lokasi strategis. Kegiatan tersebut sesuai dengan pernyataan Wakil Sekertaris bidang administrasi, data dan Informasi Erfani:

"Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci ramadhan DPD PKS Kabupaten Semarang akan memasang spanduk yang bertema Bulan Suci ramadhan dengan mencantumkan foto dari tokoh-tokoh kader PKS. Pemunculan tokoh-tokoh PKS itu penting karena sampai sekarang PKS Kabupaten Semarang belum memiliki tokoh yang banyak dikenal masyarakat" (wawancara, 29 Juli 2011).

Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan DPD PKS Kabupaten Semarang seperti yang sudah diuraikan di atas merupakan kegiatan pendidikan politik dalam upaya untuk meningkatkan kualitas para kadernya. Pada dasarnya kegiatan pendidikan politik tersebut dilaksanakan tidak hanya selalu bermuatan politik saja akan tetapi juga terdapat muatan-muatan keagamaan yang tidak terlepas dari PKS sebagai partai dakwah. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan

loyalitas kader, DPD PKS Kabupaten Semarang lebih cenderung kearah pelatihan dan pembinaan, seminar, kajian-kajian dan kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman terhadap kader baik mengenai politik maupun keagamaan. Strategi tersebut dirasa sangat tepat oleh DPD PKS Kabupaten Semarang untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat, karena dengan pelatihan dan pembinaan, diskusi, kajian-kajian, sosialisasi dan kegiatan sosial dirasa lebih mengena. Selain pendidikan politik yang dilaksanakan berupa pelatihan dan pembinaan, diskusi serta kajian, DPD PKS Kabupaten Semarang juga melakukan kegiatan bersifat sosial yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. DPD PKS Kabupaten Semarang dengan melakukan berbagai kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kepribadian, dan partisipasi politik kader serta masyarakat.

3. Kendala-Kendala dalam Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang serta Upaya Mengatasi

Pelaksanaan salah satu fungsi partai politik yaitu pendidikan politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagaimana hasil wawancara dengan Wakil Sekertaris bidang administrasi, data dan informasi PKS Kabupaten Semarang Erfani, tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut serta upaya mengatasinya oleh DPD PKS Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

• Pandangan masyarakat secara umum memandang bahwa politik itu kotor dan identik dengan uang, dan partai politik adalah lembaga

politik sehingga masyarakat seringkali antipati terhadap partai. Kendala lain yang berasal dari internal partai antara lain komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara DPC dan DPRa padahal kedua tingkatan pengurus tersebut ujung tombak pelaksanaan pendidikan politik, kemudian sarana dan prasarana yang terbatas, minimnya dana serta kurangnya pembicara atau narasumber yang berkualitas dalam pelaksanaan pendidikan politik (wawancara, 29 Juli 2011).

Dengan kondisi yang terjadi belakangan ini, seperti maraknya kasus korupsi oleh wakil rakyat membuat krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Masyarakat berpandangan bahwa politik itu kotor, akibatnya mereka tidak mau terlibat dalam dunia politik. Menurut Erfani, cara mengatasi persepsi masyarakat yang sedemikian rupa adalah sebagai berikut:

•Upaya yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan menampilkan diri sebagai partai yang santun dalam berpolitik serta bersih bagi setiap kadernya baik yang duduk sebagai anggota dewan maupun yang duduk di pemerintahan. Serta terus menjaga citra baik partai dengan tidak melakukan hal-hal yang tercela seperti korupsi, berbuat asusila dan politik uang bagi para kader (wawancara, 29 Juli 2011).

Dalam pelaksanaan pendidikan politik kendala tidak hanya berasal dari luar akan tetapi seringkali faktor lain yang berasal dari dalam internal partai sendiri, kendala tersebut antara lain seringkali adanya komunikasi yang tidak terjalin antara pengurus di tingkat DPC dan DPRa, sarana dan prasarana yang terbatas, terbatasnya dana dan kurangnya pemateri yang berasal dari dalam internal partai. Diungkapkan lebih lanjut oleh Erfani:

•Dalam melaksanakan kegiatan partai antara lain kegiatan pelatihan baik TOP (Training Orientasi Pengenalan) partai maupun TRP (Ta'dim Rutin Partai) seringkali ada DPC dan CD (Cabang Dakwah) yang tidak melaksanakannya karena tidak terbangunnya komunikasi yang baik antara DPC dan DPRa sehingga kegiatan yang seharusnya berjalan menjadi mandeg (berhenti), hal tersebut karena ada

beberapa DPRa yang tidak aktif menjalankan fungsinya dengan baik. Menanggapi masalah tersebut DPD melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan safari dakwah pimpinan PKS kedaerah yang kurang aktif dalam melaksanakan kegiatan partai, kegiatan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan dengan memberikan motivasi kepada para kader. (wawancara, 29 Juli 2011).

Mengingat perlunya komunikasi yang baik antara tiap pengurus baik dari tingkat daerah maupun ranting, sehingga program kerja yang telah disusun berjalan dengan baik maka perlu adanya komunikasi yang baik. Upaya mengatasi kendala tersebut dengan pengurus tingkat daerah langsung turun kedaerah yang kurang aktif, yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan safari dakwah yang dilakukan DPD PKS yang melibatkan anggota dewan fraksi PKS dan tokoh masyarakat. Kendala lain yang bersifat teknis pada pelaksanaan kegiatan pendidikan politik antara lain terbatas sarana dan prasarana, dana serta kurangnya pemateri yang menguasai materi, diungkapkan Erfani:

• Dana PKS diperoleh dari pemerintah, infak anggota dewan fraksi PKS, dan infak wajib kader inti dana tersebut dikelola ditingkat pusat dan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti untuk pendanaan kegiatan dan agenda DPD PKS Kabupaten Semarang, pelaksanaan program partai, gaji staf DPD, dll. Sehingga untuk dana khusus pendidikan politik sangat minim. Upaya yang dilakukan PKS dalam mengatasi pendanaan antara lain mengoptimalkan dana yang ada dengan mengefektifkan setiap kegiatan melalui penggabungan beberapa kegiatan menjadi satu sehingga untuk tempat dan sarana dapat digunakan bersamaan. Upaya mengatasi kurangnya pemateri dapat dilakukan dengan mendatangkan pemateri dari luar daerah misal dari Kota Semarang, Kendal, dan Salatiga serta meminta bantuan tokoh masyarakat yang *khafah* (menguasai materi) dibidangnya untuk menjadi pemateri (wawancara, 29 Juli 2011).

Upaya yang dilakukan DPD PKS Kabupaten Semarang mengatasi kendala-kendala tersebut dengan mengoptimalkan dana yang ada melalui

penggabungan beberapa kegiatan menjadi satu sehingga biaya dapat dihemat, mengenai sarana dan prasarana PKS Kabupaten Semarang dengan melakukan penyewaan peralatan misal LCD Monitor serta terkadang menumpang di tempat yang digunakan misal di masjid, gedung milik yayasan atau lembaga pendidikan di Kabupaten Semarang. Untuk mengatasi kurangnya pemateri yang dimiliki PKS Kabupaten Semarang dengan mendatangkan pemateri dari kader luar daerah atau meminta bantuan tokoh masyarakat yang menguasai materi dibidangnya untuk menjadi pemateri.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui observasi dan wawancara dengan informan yaitu ketua DPD, sekretaris umum dan wakil sekretaris bidang administrasi, data dan informasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kemudian dengan mengumpulkan data, arsip dan dokumen dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang, maka diperoleh informasi dan pembahasan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Partai politik yang salah satu fungsinya memberikan pendidikan politik sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, dalam penyusunan program kerja harus memasukkan materi pendidikan politik di dalamnya baik pendidikan politik bagi kader maupun masyarakat. Pendidikan politik harus didasarkan pada rumusan pasal

dalam ketentuan undang-undang tersebut, sehingga amanat yang terkandung di dalamnya dapat terlaksana dengan baik.

Partai politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan politik yang diberikan kepada kader atau anggota partai dan pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 11 ayat (1) mengatur ketentuan dari fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. R. Hajer mendefinisikan pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik (dalam Kartono, 1989: 14). Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terorganisir dan efektif yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik terutama bagi anggota atau kadernya maupun pemilih, dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak dijelaskan secara tegas mengenai pendidikan politik. Akan tetapi dari beberapa pasal dalam Anggaran Dasar tersirat mengenai pelaksanaan pendidikan politik, hal ini dapat dilihat adanya pengaturan tentang masalah keanggotaan partai, yang kemudian ketentuan mengenai keanggotaan diatur

lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Dalam melaksanakan amanat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) perlu adanya program kerja yang bersifat teknis yaitu program kerja yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan aktifitas politik partai. Program kerja Partai Keadilan Sejahtera yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kader atau anggota dimulai dari struktur organisasi terendah yaitu tingkat ranting sampai pada tingkat pusat serta pendidikan politik bagi masyarakat yang belum menjadi anggota atau kader partai. Program kerja yang berkaitan dengan pendidikan politik di DPD PKS Kabupaten Semarang meliputi berbagai kegiatan antara lain dibidang kaderisasi, pembangunan keummatan, dan kebijakan publik.

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang yaitu pendidikan politik terhadap anggota atau kader partai dan pendidikan politik terhadap pemilih. Pelaksanaan pendidikan politik menjadi tanggung jawab partai politik untuk secara khusus meningkatkan kualitas kader partainya dan secara umum meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dari program kerja yang ditetapkan DPD PKS Kabupaten Semarang dapat dinyatakan bahwa PKS sebagai partai politik yang menamakan dirinya sebagai partai da'wah, partai ini dalam kebijakannya secara serius melakukan kegiatan syiar Islam melalui da'wah kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, disamping tetap memberikan perhatian yang sangat serius pada

masalah pengkaderan. Dari sudut pandang PKS masalah pengkaderan diklasifikasi kedalam dua persoalan yaitu pembinaan kader yang sudah menjadi anggota partai serta perluasan jumlah kader melalui berbagai cara, metode dan strategi yang dimiliki oleh PKS Kabupaten Semarang .

Pelaksanaan Pendidikan politik bagi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta pemilih dilakukan dengan berbagai cara, metode serta strategi antara lain melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar (*nadwah*), kajian-kajian (*tatsqif*), sosialisasi, kegiatan sosial dan lainnya yang secara rutin dilakukan pada tingkatan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Cabang Dakwah (CD) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRa). Kegiatan pendidikan politik PKS tidak hanya selalu bermuatan politik akan tetapi juga terdapat muatan-muatan materi keagamaan yang tidak terlepas dari ciri PKS sebagai partai dakwah. Pendidikan politik oleh DPD PKS Kabupaten Semarang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kadernya saja namun juga sebagai upaya tanggung jawab partai politik untuk ikut memberikan pemahaman dan penyadaran masyarakat akan politik.

Dilihat dari karekteristik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam melaksanakan pendidikan politik, dapat dikatakan bahwa PKS sebagai partai kader. Partai kader ialah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi anggota dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan

disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur organisasi partai ini sangat hirarkhis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas (Ramlan surbakti dalam Suryadi, 2006: 62). Definisi mengenai partai kader sangat tepat bagi PKS karena ciri partai kader hampir ada dalam partai ini serta dalam menjalankan kegiatan kepartaian PKS tidak mengandalkan satu atau beberapa tokoh partai dalam mengembangkan partai namun semua keberhasilan partai merupakan hasil kerja keras para kader PKS.

2. Kendala-Kendala dalam Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang serta Upaya Mengatasi

Proses pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan partai dan masyarakat, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala sehingga membuat hasilnya kurang maksimal. Kendala tersebut antara lain karena adanya pandangan yang negatif masyarakat terhadap partai politik. Pandangan pragmatis masyarakat bahwa politik itu kotor dan politik identik dengan uang, dimana yang memiliki uanglah yang dapat menang dalam politik, sebagai lembaga politik partai politik tentunya dianggap sebagai lembaga yang demikian pula. Diperparah dewasa ini pemberitaan mengenai partai politik, mulai dari partai politik yang dianggap mementingkan kepentingan partainya saja ketika partai berhasil mengantarkan kader partai menduduki jabatan politik tertentu di pemerintahan maupun legislatif seringkali kebijakan-kebijakan yang diambil tidak memihak pada kepentingan rakyat.

Banyaknya kasus korupsi yang menimpa para kader partai politik yang duduk dalam pemerintahan dan sebagai anggota legislatif, membuat masyarakat menjadi antipati terhadap partai politik

Kendala lain yang berasal dari dalam internal partai yaitu adanya komunikasi yang tidak terjalin antara DPC dan DPRanting yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan politik, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa pengurus pada tingkat ranting atau desa yang tidak aktif sehingga ketika diadakannya pendidikan politik di DPC ataupun Cabang Dakwah tidak dapat berpartisipasi. Sarana dan prasarana yang terbatas meliputi tempat dan sarana pendukung pelaksanaan pendidikan politik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang sampai saat ini belum memiliki tempat yang representatif bagi pelaksanaan pendidikan politik dan kurangnya sarana pendukung seperti LCD Monitor yang seringkali dipergunakan sebagai media pendidikan politik. Kendala lain yaitu alokasi dana yang kurang, walaupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menjalankan kegiatan tidak berdasarkan pada dana yang ada, akan tetapi merupakan sukarela baik dari pengurus maupun masyarakat yang mengikuti pelaksanaan pendidikan politik tidak dapat dipungkiri bahwa dana juga penting dalam melancarkan kegiatan. Dana diperlukan untuk pelaksanaan program partai, melakukan sosialisasi di masyarakat dan biaya operasional dalam pelaksanaan pendidikan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kurangnya dana yang ada, membuat agenda dan program partai tidak terlaksana secara maksimal. Kemudian kendala

berikutnya adalah kurangnya kader partai yang dapat menjadi narasumber atau pemateri dalam pelaksanaan pendidikan politik. Pemateri merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pendidikan politik. Tersampaikan atau tidaknya materi yang ada, tergantung pada kemampuan pemateri dalam menyajikan materi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam upaya mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik, *pertama* berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dengan terus menjaga citra baik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai da'wah dan partai yang berasaskan Islam dengan tidak melakukan tindakan seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba dan berbuat asusila oleh kader partai. Terlebih lagi bagi kader partai yang menduduki jabatan-jabatan strategis pada lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif harus dapat menjadi figur serta pemimpin yang baik bagi rakyatnya. *Kedua*, upaya yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menyelesaikan masalah komunikasi yang tidak terjalin antara DPC dan DPRa dikarenakan terdapat beberapa pengurus yang tidak aktif, yaitu dengan mengadakan kunjungan atau safari dakwah oleh pengurus tingkat daerah ke beberapa wilayah yang pengurus atau kadernya kurang aktif sekaligus memberikan motivasi dan pengarahan bagi pelaksanaan partai ke depan. *Ketiga*, upaya yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mengatasi ketiadaan gedung yang representatif yaitu dengan menyewa tempat, menumpang di

gedung-gedung milik ormas, yayasan, atau lembaga pendidikan di Kabupaten Semarang yang memiliki kepedulian terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sedangkan sarana pendukung seperti LCD Monitor dengan menyewa di tempat persewaan atau meminjam di lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Semarang. *Keempat*, dalam upaya mengatasi terbatasnya dana yaitu dengan menggabungkan beberapa kegiatan menjadi satu. Hal tersebut dilakukan untuk mengefektifkan dana yang ada, sehingga kegiatan tetap berjalan. Penggabungan dilakukan dengan catatan bahwa kegiatan tersebut tidak bertentangan dan dapat dilakukan pada waktu bersamaan serta memiliki sasaran dan peserta yang sama. *Kelima*, upaya yang dilakukan menanggapi kurangnya narasumber atau pemateri dalam pelaksanaan pendidikan politik dilakukan dengan mendatangkan pemateri yang berasal dari luar DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang dan meminta bantuan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Semarang yang menguasai materi di bidangnya untuk menjadi pemateri.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pendidikan politik PKS Kabupaten Semarang dilaksanakan menggunakan berbagai metode dan strategi antara lain kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar, kajian-kajian, sosialisasi dan kegiatan sosial. Pelaksanaannya ditentukan menurut kondisi yang tepat, terjadwal dan rutin, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kegiatan disesuaikan dengan kondisi yang ada.
2. Pendidikan politik PKS Kabupaten Semarang pada pelaksanaannya tidak hanya selalu bermuatan politik saja akan tetapi juga terdapat muatan-muatan materi ke Islaman hal tersebut tidak terlepas dari PKS sebagai partai dakwah.
3. Pelaksanaan pendidikan politik tidak selalu berjalan dengan lancar, seringkali ada kendala-kendala, antara lain: a) adanya pandangan negatif masyarakat terhadap partai politik, b) komunikasi yang tidak terjalin antara DPC dan DPRa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan politik, c) sarana dan prasarana yang terbatas meliputi tempat dan sarana pendukung pelaksanaan pendidikan politik, d) terbatasnya dana, dan e)

kurangnya kader partai yang dapat menjadi narasumber atau pemateri dalam pelaksanaan pendidikan politik.

4. Upaya yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang untuk mengatasi kendala dalam pendidikan politik dengan cara:
 - a) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dengan terus menjaga citra baik partai, b) mengadakan kunjungan atau safari dakwah oleh pengurus tingkat daerah ke beberapa wilayah yang pengurus atau kadernya kurang aktif, c) menyewa atau menumpang di gedung milik yayasan atau lembaga pendidikan di Kabupaten Semarang, sedangkan sarana pendukung dengan menyewa atau meminjam, d) mengoptimalkan dana dengan menggabungkan beberapa kegiatan menjadi satu, dan e) mendatangkan pemateri dari luar daerah dan meminta tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Semarang yang menguasai materi dibidangnya untuk menjadi pemateri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang, berikut adalah saran yang dapat peneliti rekomendasikan:

1. Partai Politik
 - a. Untuk dapat menyusun laporan dan dokumentasi setiap kegiatan dengan baik DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) perlu mengadakan pelatihan khusus bagi para kader di tingkat DPC dan Cabang Dakwah

agar mampu menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan partai yang menarik.

- b. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kegiatannya harus mampu hadir di tingkat paling bawah di masyarakat tidak hanya di tingkat ranting atau desa saja, akan tetapi dapat hadir di tingkat dusun bahkan RT/RW sebagai upaya meningkatkan kepercayaan dan komunikasi dengan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aritasius, Sugiya, Dkk. 2004. *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Buku Kompas.
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan obor.
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kamarudin. 2003. *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi Refleksi Pemilu 1999 Untuk Pemilu 2004*. Jakarta: Visi Publishing.
- Karim, Rusli, M. 1989. *Peranan ABRI Dalam Politik dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Kartono, Kartini. 1989. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Jakarta: Mandar Maju.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muis, Ruslan. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia.
- Nur, Khoiron. 1999. *Pendidikan Politik bagi Warga Negara, Tawaran Operasioanal dan Kerangka Kerja*. Yogyakarta: LKIS.
- Prihatmoko, Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP21 Press.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Suryadi, Budi. 2006. *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonasia*. Yogyakarta: ICRiSoD.

Sumber lain

- DPP PKS. *AD/ART Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*. <http://www.pk-sejahtera.org/tentang/tentang-pks.dot>. (22 Jan 20011).

KPU Kabupaten Semarang. *Buku Laporan Kegiatan Pemilu 2004 di Kabupaten Semarang.*

Nasiwan, 2005. *Model Pendidikan Politik: Studi Kasus PKS DPD Sleman, Yogyakarta.* <http://eprints.uny.ac.id/3714/1/A08-nasiwan.pdf>. (22 Jan. 2011).

UU No. 2 tahun 2008. *Tentang Partai Politik.* <http://ipdprojects.org/logolink-sea/resources/pdf/Law%20on%20Political%20Parties%202008%20Indonesia.pdf>. (7 Okt 2009).



INSTRUMEN PENELITIAN

PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) KABUPATEN SEMARANG

TUJUAN	INDIKATOR	PERTANYAAN	SASARAN/ OBYEK
Pelaksanaan pendidikan politik dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat	Pendidikan politik	1. Bagaimana pandangan Partai Keadilan Sejahtera terhadap pendidikan politik?	Pimpinan DPD PKS
		2. Apakah yang melatar belakangi DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang mengadakan pendidikan politik?	Pimpinan DPD PKS
		3. Apakah tujuan dilaksanakannya pendidikan politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang?	Pimpinan DPD PKS
		4. Apakah pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang telah diprogramkan sebelumnya?	Pimpinan DPD PKS
		5. Siapa yang menjadi sasaran dilaksanakannya	Pimpinan DPD PKS

		<p>pendidikan politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang?</p> <p>6. Apakah ada jenjang dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang?</p> <p>7. Apa yang anda ketahui tentang Pendidikan Politik?</p> <p>8. Apakah yang melatar belakangi anda mengikuti kegiatan pendidikan politik?</p> <p>9. Apakah manfaat yang anda peroleh dari pendidikan politik yang pernah anda ikuti?</p> <p>10. Bagaimana sikap anda dengan adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang?</p>	<p>Pimpinan DPD PKS</p> <p>Kader, Simpatisan PKS dan masyarakat</p>
--	--	---	---

		<p>11. Apakah pendidikan politik menambah pengetahuan anda?</p> <p>12. Dari mana anda memperoleh informasi akan diadakannya pendidikan politik oleh DPD Partai keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang?</p>	<p>Kader, Simpatisan PKS dan masyarakat</p> <p>Kader, Simpatisan PKS dan masyarakat</p>
<p>Pelaksanaan pendidikan politik</p>		<p>13. Seberapa sering DPD Partai Keadilan Sejahtera mengadakan pendidikan politik?</p> <p>14. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam melaksanakan pendidikan politik?</p> <p>15. Dimanakah tempat yang sering digunakan untuk pelaksanaan pendidikan politik?</p> <p>16. Apakah tempat yang selama ini digunakan sudah cukup memadai serta representatif bagi para peserta pendidikan politik?</p>	<p>Pimpinan DPD PKS</p> <p>Pimpinan DPD PKS</p> <p>Pimpinan DPD PKS</p> <p>Pimpinan DPD PKS</p>

		<p>17. Dimana dan bagaimana proses pendidikan politik yang pernah anda ikuti?</p> <p>18. Media apa yang digunakan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan pendidikan politik?</p> <p>19. Metode apakah yang digunakan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang dalam melaksanakan pendidikan politik?</p> <p>20. Adakah ciri khas pendidikan politik yang dilakukan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang?</p> <p>21. Apakah yang membedakan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai lain?</p>	<p>Kader, Simpatisan PKS dan masyarakat</p> <p>Pimpinan DPD PKS</p> <p>Pimpinan DPD PKS</p> <p>Pimpinan DPD PKS</p> <p>Pimpinan DPD PKS</p>
--	--	---	---

	<p>22. Apakah materi yang disampaikan dalam pendidikan politik ditentukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang?</p> <p>23. Siapa yang menjadi pemateri / narasumber dalam pelaksanaan pendidikan?</p> <p>24. Berapakah jumlah peserta dalam setiap pelaksanaan pendidikan politik?</p>	<p>Pimpinan DPD PKS</p> <p>Pimpinan DPD PKS</p> <p>Pimpinan DPD PKS</p>
Partisipasi politik	<p>25. Berapakah jumlah kader PKS yang telah tercatat di DPD PKS Kabupaten Semarang?</p> <p>26. Apakah salah satu tujuan pendidikan politik yang diadakan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat?</p> <p>27. Apakah yang menjadi indikator meningkatnya partisipasi politik para peserta pendidikan politik?</p>	<p>Pimpinan DPD PKS</p> <p>Pimpinan DPD PKS</p> <p>Pimpinan DPD PKS</p>

		28. Sejauh mana tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Semarang, menurut DPD PKS Kabupaten Semarang?	Pimpinan DPD PKS
		29. Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan politik?	Pimpinan DPD PKS
Kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta upaya mengatasinya	Kendala pendidikan politik	30. Apakah dalam pelaksanaan pendidikan politik DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang mengalami kendala?	Pimpinan DPD PKS
		31. Kendala apa yang sering kali dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan politik?	Pimpinan DPD PKS
	Upaya mengatasi kendala	32. Bagaimana DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang mengatasi segala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan politik?	Pimpinan DPD PKS

LAMPIRAN GAMBAR



Gambar 1. Kantor sekretariat DPD PKS Kabupaten Semarang (Dok. Pribadi)



Gambar 2. Ruang sekretariat DPD PKS Kabupaten Semarang (Dok. Pribadi)



Gambar 3. Pembagian Takjil Buka Puasa PKS Kabupaten Semarang (Dok Pribadi)



Gambar 4. Tarhib Ramadhan DPC Kecamatan Bawen (Dok. DPD PKS Kabupaten Semarang)



Gambar 5. Pawai Ramadhan PKS Kabupaten Semarang (Dok. DPD PKS Kabupaten Semarang)



Gambar 6. Rapat Koordinasi Pengurus DPD dan DPC PKS Kabupaten Semarang (Dok. DPD PKS Kabupaten Semarang)